

SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BINA KELUARGA BALITA (BKB) PADA UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG

Disusun oleh:

Nama : DEDI ROHMAN

NPM : E. 1735223098

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menempuh
Sidang Skripsi dan Komprehensif**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

2021

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BINA KELUARGA
BALITA (BKB) PADA UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH
DARMARAJA
KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Sumedang, 2021

Pembimbing Skripsi:

Pembimbing I



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-3012-7102

Pembimbing II



Irma Hermavanty, S.Pd., M.Si
NIDN. 04-1811-7910

Mengetahui/Menyetujui,
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
Sebelas April Sumedang
Ketua,



Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
NIDN. 04-3012-7102

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BINA
KELUARGA BALITA (BKB) PADA UPTD PENGENDALIAN
PENDUDUK WILAYAH DARMARAJA
KABUPATEN SUMEDANG**

Diterima dan Disetujui oleh Tim Penguji Skripsi
SekolahTinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

Penguji I

: Dadang Suhendi, S.Sos., M.Si

:

Penguji II

: Lalas Sulastris, S.Sos., M.Si

:

Penguji III

: Teddy Marliady Nurwan, S.Sos., M.Si

:

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

SEBELAS APRIL SUMEDANG

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : **DEDI ROHMAN**
NOMOR POKOK : E. 1735223098
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PROGRAM BINA KELUARGA BALITA (BKB)
PADA UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK
WILAYAH DARMARAJA KABUPATEN
SUMEDANG.

Telah mempertahankan Skripsi di hadapan Panitia Penguji Skripsi Sekolah Tinggi
Ilmu Administrasi Sebelas April Sumedang

Hari : . Jum'at & Sabtu

Tanggal : 13 & 14 Agustus 2021

Pukul : 08:00 WIB s.d Selesai

TELAH DINYATAKAN LULUS

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Sir, S.

Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si

Pembimbing I : Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si

Pembimbing II : Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul: **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BINA KELUARGA BALITA (BKB) PADA UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG”**.

Peneliti banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan Skripsi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Yth. Bapak H. Yuyun Hidayat, Drs selaku Ketua Yayasan Sebelas April Sumedang.
2. Yth. Ibu Rika Kusdinar, S.Sos.,M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang dan selaku Pembimbing I yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini.
3. Yth. Bapak Dadan Setia Nugraha, S.Sos.,M.Si Selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
4. Yth. Bapak Shofwan Hendryawan, S.Pd.,M.Pd Selaku Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang.
5. Yth. Ibu Irma Hermayanti, S.Pd., M.Si Selaku Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang dan selaku Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Yth. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang yang telah menyumbangkan ilmunya kepada peneliti selama mengikuti perkuliahan.
7. Yth. Seluruh Staf TU Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang yang telah membantu peneliti selama penelitian.
8. Yth. Kepala UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja yang telah memberikan ijin penelitian serta memberikan bimbingan kepada peneliti.

9. Yth. Seluruh pegawai UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja yang telah membantu peneliti selama penelitian.
10. Rekan-rekan Mahasiswa STIA Sebelas April Sumedang.
11. Orangtua dan seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril.
12. Sahabat-sahabat terbaik yang selalu ada dalam suka duka perjalanan kuliah.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu terselesaikannya Skripsi ini. Semoga Skripsi ini memberikan informasi bagi pembaca dan bermanfaat untuk pengembangan wawasan dan peningkatan ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Sumedang, Juli 2021
Peneliti

DEDI ROHMAN
E. 1735223098



ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BINA KELUARGA BALITA (BKB) PADA UPTD PENGENDALIAN PENDUDUK WILAYAH DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG

Disusun Oleh :

Nama : DEDI ROHMAN

NPM : E. 1735223098

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

219 Halaman, 5 Bab, 63 Tabel, 5 Gambar, Lampiran

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan: *“Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Keluarga Balita (Bkb) Pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang”*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan laporan praktek penelitian administrasi adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti menggunakan teknik triangulation (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif. Sedangkan untuk teknik yang digunakan dalam penentuan informan dari populasi yang ada di UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang penentuan informannya menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik yang dapat menentukan siapa saja yang mengetahui akan informasi yang terkait akan penelitian, dan terpilihlah menjadi 5 Informan dari masing-masing bidang.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) Pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang dilaksanakan dimulai dengan tahap Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, Partisipasi dalam Pelaksanaan, Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil dan Partisipasi dalam Evaluasi. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang mengalami beberapa faktor penghambat dari Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang mencakup beberapa gejala seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, Kurangnya kesadaran, masih rendahnya kualitas kader yang dilihat berdasarkan usia yang dimiliki. Upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan proses pelaksanaan proses Partisipasi Masyarakat adalah dengan Mengidentifikasi pengguna jasa, pembentukan standard kualitas pelayanan, peningkatan kegiatan sosialisasi program, meningkat kan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk keberhasilan program selanjutnya.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHANSKRIPSI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Fokus Permasalahan 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Kegunaan Penelitian 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi 13

1. Unsur-Unsur Administrasi 17

a) Administrasi Negara 17

b) Organisasi 21

c) Manajemen 27

d) Manajemen Sumber Daya Manusia 29

e) Partisipasi 34

B. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian 38

C. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) 40

1. Partisipasi Masyarakat 40

2. Program Bina Keluarga Balita (BKB) 48

D. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayan Darmaraja 55

1. Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayan Darmaraja	55
2. Faktor- faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayan Darmaraja .	57
3. Upaya-Upaya dalam mengatasi Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayan Darmaraja	59
E. Kajian Penelitian Terdahulu	61
F. Kerangka Pemikiran dan Kisi-kisi Instrumen Penelitian	66
1. Kerangka Pemikiran	66
2. Kisi-kisi Instrumen Penelitian	73

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian	75
B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian	78
1. Penentuan sasaran	78
2. Informan Penelitian	79
C. Teknik Pengumpulan Data	80
D. Teknik Pengolahan Data	83
E. Lokasi dan Jadwal Penelitian	84

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	86
1. Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Dalduk Wilayah Darmaraja.....	86
2. Organisasi dan Tata Kerja Objek Penelitian	87
3. Visi-Misi UPTD Dalduk Wilayah Darmaraja.....	92
B. Karakteristik Sasaran Penelitian.....	97

C. Hasil Penelitiandan Pembahasan Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina KeluargaBalita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja	97
a. Dimensi Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	99
b. Dimensi Partisipasi dalam Pelaksanaan	109
c. Dimensi Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil	116
d. Dimensi Partisipasi dalam Evaluasi	127
D. Faktor-Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat.....	138
a. Dimensi Faktor Internal	139
b. Dimensi Faktor Eksternal	170
E. Upaya-Upaya dalam Mengatasi Hambatan Partisipasi Masyarakat	180
a. Dimensi Formulasi	180
b. Dimensi Promosi	190
c. Dimensi Perbaikan Pelayanan	194
d. Dimensi Monitoring	198
e. Dimensi Evaluasi.....	202
BAB V PENUTUP	210
A. Kesimpulan.....	210
B. Saran	212
DAFTAR PUSTAKA	214
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Operasional Pelayanan Bina Keluarga Balita Kec. Darmaraja...	6
Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu	63
Tabel 2.2 Kisi – Kisi Instrumen Penelitian	73
Tabel 3.1 Sasaran Penelitian	78
Tabel 3.2 Informan Penelitian	80
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian	85
Tabel 4.1 Data Pegawai UPTD Dalduk Wilayah Darmaraja.....	95
Tabel 4.2 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	96
Tabel 4.3 Data Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan	96
Tabel 4.4 Data Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	97
Tabel 4.5 Reduksi Data Mengenai Indikator Keputusan Awal.....	101
Tabel 4.6 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Keputusan Awal	101
Tabel 4.7 Reduksi Data Mengenai Indikator Keputusan yang sedang Berlangsung	104
Tabel 4.8 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Keputusan Yang sedang Berlangsung	104
Tabel 4.9 Reduksi Data Indikator Keputusan Operasional	107
Tabel 4.10 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Keputusan Operasional	108
Tabel 4.11 Reduksi Data Mengenai Indikator Kontribusi Sumber Daya	110
Tabel 4.12 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Kontribusi Sumber Daya	111
Tabel 4.13 Reduksi Data Mengenai Indikator Program Kepesertaan Kegiatan.....	113
Tabel 4.14 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Program Kepesertaan Kegiatan.....	115
Tabel 4.15 Reduksi Data Mengenai Indikator Materi.....	118
Tabel 4.16 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Materi.....	119
Tabel 4.17 Reduksi Data Mengenai Indikator Sosial.....	122

Tabel 4.18 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Sosial	123
Tabel 4.19 Reduksi Data Mengenai Indikator Pribadi.....	125
Tabel 4.20 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Pribadi.....	127
Tabel 4.21 Reduksi Data Mengenai Indikator Partisipasi Langsung	129
Tabel 4.22 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Partisipasi Langsung	131
Tabel 4.23 Reduksi Data Mengenai Indikator Partisipasi Tidak Langsung	134
Tabel 4.24 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Partisipasi Tidak Langsung	136
Tabel 4.25 Kesimpulan Jawaban Hasil Wawancara Partisipasi Masyarakat	137
Tabel 4.26 Reduksi Data Mengenai Indikator Pengetahuan.....	141
Tabel 4.27 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Pengetahuan.....	143
Tabel 4.28 Reduksi Data Mengenai Indikator Keahlian.....	146
Tabel 4.29 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Keahlian.....	147
Tabel 4.30 Reduksi Data Mengenai Indikator Pekerjaan Masyarakat.....	150
Tabel 4.31 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Pekerjaan Masyarakat	151
Tabel 4.32 Reduksi Data Mengenai Indikator Tingkat Pendidikan.....	154
Tabel 4.33 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Tingkat Pendidikan.	156
Tabel 4.34 Reduksi Data Mengenai Indikator Jenis Kelamin.....	158
Tabel 4.35 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Jenis Kelamin	161
Tabel 4.36 Reduksi Data Mengenai Indikator Usia	162
Tabel 4.37 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Usia	164
Tabel 4.38 Reduksi Data Mengenai Indikator Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu	167
Tabel 4.39 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu	169
Tabel 4.40 Reduksi Data Mengenai Indikator Hubungan Stakeholder.....	172
Tabel 4.41 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Hubungan Stakeholder.....	174
Tabel 4.42 Reduksi Data Mengenai Indikator Pihak yang Berpengaruh	176

Tabel 4.43 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Pihak yang Berpengaruh	177
Tabel 4.44 Kesimpulan Jawaban Hasil Wawancara Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	179
Tabel 4.45 Reduksi Data Mengenai Indikator Identifikasi PenggunaJasa..	182
Tabel 4.46 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Identifikasi PenggunaJasa	184
Tabel 4.47 Reduksi Data Mengenai Indikator Pembentukan Standar Kualitas Pelayanan.....	187
Tabel 4.48 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Indikator Pembentukan Standar Kualitas Pelayanan.....	189
Tabel 4.49 Reduksi Data Mengenai Indikator Kegiatan Sosialisai Program	191
Tabel 4.50 Triangulasi Pengumpulan Data Mengenai Indikator Kegiatan Sosialisai Program	193
Tabel 4.51 Reduksi Data Mengenai Indikator Cepat tanggap Dan Klarifikasi Keluhan.....	196
Tabel 4.52 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Cepat tanggap Dan Klarifikasi Keluhan.....	197
Tabel 4.53Reduksi Data Mengenai Indikator Adanya Penyampaian Hasil Layanan Program	199
Tabel 4.54 Triangulasi Pengumpulan Data IndikatorAdanya Penyampaian Hasil Layanan Program	202
Tabel 4.55 Reduksi Data Mengenai Indikator Penyebaran Kusioner untuk melihat Kondisi Lapangan.....	204
Tabel 4.56 Triangulasi Pengumpulan Data Indikator Penyebaran Kusioner untuk melihat kondisi lapangan.....	206
Tabel 4.57 Kesimpulan Jawaban Hasil Wawancara Faktor-faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat	207

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Diagram Partisipasi Masyarakat pada Program BKB	56
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Partisipasi Masyarakat dalam Program BKB UPTD Dalduk Wilayah Darmaraja.....	72
Gambar 3.1 Desain Penelitian.....	77
Gambar 3.2 Komponen Analisis Data	83
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdaya guna dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut disamping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal, kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat tersebut dalam perjalanan belum berpihak secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan masyarakat. Disadari bersama bahwa mengubah suatu sistem politik ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat terjadi dalam waktu relatif singkat. Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan UU, kebijakan Pemerintah, kesiapan dari masyarakat dan birokrasi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat. Dengan kata lain ide-ide tentang otonomi daerah, demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dalam pembangunan memiliki dinamika sendiri dalam implementasinya baik di pusat, daerah dan desa. Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan

peran serta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan *civil society* sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya Pembangunan Bangsa secara keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari pembangunan masyarakat desa. Pembangunan desa juga tidak hanya meliputi pembangunan dalam bidang infrastruktur tetapi juga lebih kepada aspek pembangunan manusia itu sendiri seperti kualitas masyarakat dari segi pertumbuhan dan pendidikan yang terkait dengan kemajuan dari masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu kepedulian Pemerintah terhadap pendidikan anak dilakukan dengan Program Bina Keluarga Balita (BKB). Program ini lahir dari prakarsa Menteri Negara Urusan Peranan Wanita yang merupakan bagian integral dari upaya nasional dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Konsep tersebut tentunya tidak sebatas pada pendidikan saja, tetapi dengan memberikan penekanan pada pendidikan bagi penduduknya. Kualitas sumber daya manusia ini akan mampu mengatasi masalah-masalah sosial lainnya yang bersumber dari persoalan kependudukan itu sendiri.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berupaya mengoptimalkan peran pemerintah daerah agar ikut andil dalam pelaksanaan program ini serta dapat bersentuhan langsung dan memberikan manfaat pada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah. Salah satu yang menjadi kegiatan yang paling utama dari seluruh program yaitu Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan kelompok dengan upaya meningkatkan pengetahuan,

kesadaran serta keterampilan ibu maupun anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita yang dimiliki dalam keluarga.

Tujuan diadakan Bina Keluarga Balita (BKB) ini adalah meningkatkan peran ibu dan anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin tumbuh kembang anak yang menyeluruh dan terpadu baik intelektual atau pun spiritual, emosional dan sosial yang berarti pula menjadikan anak Indonesia menjadi anak yang berkualitas. Tujuan ini jelas menekankan pada upaya membangun kesadaran pengetahuan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam proses pendidikan anak. Program ini sendiri sudah berjalan puluhan tahun, dan berjalan secara fluktuatif dan mengalami pasang surut. Tentunya program ini sendiri tidak sepenuhnya steril atau bersih dari perubahan politik yang terjadi di Indonesia, seperti pergantian departemen, alokasi dana yang disediakan, sumber daya yang ada dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi. Meskipun demikian, program dan kegiatannya di beberapa daerah di Indonesia masih berjalan dan masih bernaung di bawah koordinasi BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional).

Program Bina Keluarga Balita (BKB) ini dilakukan secara hirarkis. Pada tingkat Kabupaten, program ini langsung di bawah tanggungjawab Bupati/Walikota. Penanggung jawab operasional adalah Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Tingkat II (Pemerintah Kabupaten). Pada tingkat II (Pemerintah Kabupaten) ini dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Program Bina

Keluarga Balita (BKB). Sedangkan pada tingkat Kecamatan, Camat sebagai Penanggungjawab.

Dan untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai penanggungjawab operasional. Untuk membantu Camat dalam pelaksanaan program, di tingkat kecamatan dibentuk tim operasional Bina Keluarga Balita (BKB). Tingkat desa atau kelurahan, Kepala Desa atau Lurah sebagai penanggungjawab umum program Bina Keluarga Balita (BKB). Sedangkan untuk Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagai penanggungjawab operasional. Untuk membantu pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) di tingkat Desa dibentuk Kelompok Pelaksana (Poklak) Program Bina Keluarga Balita (BKB). Di samping itu program Bina Keluarga Balita (BKB) dalam implementasinya juga dibantu oleh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) disemua tingkatan, yang secara operasional masuk ke dalam Pokja IV PKK.

Program Bina Keluarga Balita (BKB) ini dilaksanakan di tingkat Desa atau Kelurahan dengan membentuk beberapa kelompok berdasarkan letak geografisnya. Pelaksanaan ini secara operatif dapat dilakukan pada tingkat Dusun (Kadus), Rukun Warga (RW) ataupun Rukun Tetangga (RT). Program ini sebenarnya biasanya dilakukan mengikuti struktur adat yang ada. Kegiatan ini dilakukan dalam kelompok-kelompok, dalam kelompok itu dibagi beberapa kelas. Sementara dari sisi waktu pelaksanaan, program ini kegiatannya dilakukan sebulan sekali, dua minggu sekali atau seminggu sekali, semua tergantung dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.

Keberhasilan Program ini sangat ditentukan oleh para Kader yang terjun langsung memberikan materi penyuluhan. Sebagaimana disebutkan sendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis, Kader sebagai relawan yang bertanggungjawab bertugas memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Pada kenyataannya, para Kader ini kebanyakan Ibu-Ibu atau Remaja Putri yang telah dilatih oleh Petugas Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memberikan materi Bina Keluarga Balita (BKB) kepada Keluarga Balita. Kredibilitas Kader sebagai Komunikator dalam program ini mencakup aspek-aspek yang sifatnya rasional sampai hal yang bersifat kultural. Persoalan kompetensi, relevansi, kapabilitas, dan proksimitas menjadi faktor-faktor yang secara teoritik sering dipertimbangkan sebagai faktor-faktor yang menentukan kesuksesan penyampaian pesan dari komunikator.

Persoalan yang cukup dilematis terjadi di Kecamatan Darmaraja mengingat Program Bina Keluarga Balita (BKB), seharusnya banyak diminati oleh ibu-ibu ataupun remaja putri sebagai kader. Namun kondisi ini justru menjadi tanda tanya mengingat cukup banyaknya warga atau kepala keluarga yang mempunyai balita umur 0-5 tahun. Pendataan Operasional Pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB) Kecamatan Darmaraja dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Operasional Pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB) Kecamatan Darmaraja

NO	DESA	SASARAN BKB (DESA)	SASARAN BKB (DUSUN)	YANG MENJADI ANGGOTA BKB
1	DARMARAJA	239	66	59
2	DARMAJAYA	253	98	80
3	SUKAMENAK	79	36	32
4	SUKARATU	169	54	36
5	CIKEUSI	128	44	36
6	CIPEUTEUY	84	49	35
7	CIEUNTEUNG	232	99	76
8	KARANGPAKUAN	228	57	52
9	NEGLASARI	152	58	55
10	PAKUALAM	54	31	20
11	TARUNAJAYA	299	74	67
12	RANGGON	182	82	76
KEC		2099	748	624

(sumber: Pendataan Kecamatan Darmaraja tahun 2020)

Dilihat dari data tersebut di atas yang berjumlah sekitar 2099 Kepala Keluarga yang juga berarti terdapat 2099 jiwa ibu-ibu yang seharusnya berperan aktif sebagai kader dalam menyukseskan Program Bina Keluarga Balita (BKB) terlebih lagi kegiatan dari program ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan. Belum lagi dengan jumlah perempuan yang belum berkeluarga (wanita dewasa) tapi mempunyai potensi yang dapat diandalkan untuk menyukseskan kegiatan ini.

Dengan jumlah kader yang seharusnya pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) dapat berjalan dengan baik tanpa kekurangan kader sehingga peserta Bina Keluarga Balita (BKB) juga merasa terpenuhi pengetahuannya tentang tumbuh kembang anak. Namun pada kenyataannya para kader yang terlibat dalam kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) secara kuantitatif hanyalah terbatas pada segelintir individu yang telah lama aktif dalam sejumlah kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Padahal dari sisi jumlah masih banyak ibu-ibu atau remaja putri di Wilayah Kecamatan Darmaraja yang dilihat dari sisi kualitas mampu untuk menjadi motivator dan inisiator pada program Bina Keluarga Balita (BKB) ini. Dengan begitu, diharapkan peran dan peningkatan pemberdayaan kader-kader dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) ini akan semakin tinggi terutama pada wilayah yang kondisi penduduknya cukup banyak, sehingga dapat membuka peluang yang lebih besar untuk menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat atau ibu-ibu betapa pentingnya mengamati setiap perkembangan anak. Namun pada kenyataannya hal ini cenderung mustahil terjadi, sebab ibu-ibu lebih memilih menghabiskan waktunya dengan sejumlah pekerjaan dibandingkan melakukan pembinaan terhadap tumbuh kembang anak.

Prasyarat wajib dalam pembentukan program Bina Keluarga Balita (BKB) yang harus dipenuhi adanya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah, ketersediaan data dan informasi kependudukan yang akurat serta adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini yaitu dukungan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang akan

dilakukan dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Balita (BKB) secara berkesinambungan. Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan, pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Partisipasi Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keberhasilan Program Bina Keluarga Balita (BKB) tidak hanya mengandalkan Pemerintah, tapi peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi. Adanya partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita ini akan memenuhi kebutuhan masyarakat pelaksanaan integrasi dengan mensejahterakan masyarakat dan membangun masyarakat berbasis keluarga.

Berdasarkan hasil observasi dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam menunjang keberhasilan program Bina Keluarga Balita (BKB), hal ini dapat dilihat dari anak-anak

mereka yang hanya belajar dan bermain di rumah saja, tidak ikut mendaftar meskipun sudah diberikan arahan, karena mereka masih menganggap tidak terlalu penting dan mereka berpikir dengan mengembangkan pola asuh di rumah saja sudah sangat cukup.

2. Kurangnya kesadaran orangtua terhadap permasalahan tumbuh kembang balita. Hal ini dibuktikan masih banyaknya balita yang terlambat berjalan, terlambat bicara, *carebral palsy*, *autisme*, *sindrom down*. Permasalahan-permasalahan tumbuh kembang balita tersebut tidak hanya dikarenakan keturunan tetapi biasanya dari kekurangan nutrisi yang diberikan, kurangnya perhatian dan kurangnya pengetahuan dari orangtua.
3. Masih rendahnya kualitas kader pos kesehatan Bina Keluarga Balita, hal ini dapat dilihat dari pendidikan rendah yang dimiliki para kader dan minimnya pengalaman para kader, usia yang dimiliki para kader mayoritas 40 tahun ke atas.

Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka Peneliti merasa tertarik untuk mengangkat tema tentang pelaksanaan program bina keluarga balita yang kemudian diwujudkan melalui judul Skripsi **“Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang”**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian dan masalah tersebut di atas, maka fokus permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat pada Partisipasi Masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja?
3. Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menjawab akan permasalahan partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja, yakni:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pada partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.

3. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pada partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan wacana guna pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Bagi lembaga, penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan salah satu referensi atau masukan terhadap peningkatan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan informasi mengenai program Bina Keluarga Balita (BKB), dimana masyarakat bisa lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pelaksanaan program Bina Keluarga Balita (BKB) kedepannya.

c. Bagi Instansi/ Dinas

Bagi Instansi/Dinas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masukan dalam kemajuan program dan kegiatan pembangunan instansi yang berkesinambungan, serta dapat dijadikan bahan evaluasi atau pertimbangan dalam memperbaiki kekeliruan atau meningkatkan pembangunan ke tingkat yang lebih baik dari sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakekat Administrasi

Perkembangan administrasi dalam era globalisasi sekarang ini menunjukkan gejala perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat, demikian juga keterkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya. Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata *administration* yang bentuk infinitifnya adalah *to administer*. Dalam Oxford *Advanced Learner's Dictionary Of Current English* (1974), kata *to administer* diartikan sebagai *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan).

Mengenai pengertian administrasi Handayani (2003: 5), mengemukakan dua batasan, yaitu:

1. Administrasi dalam arti sempit, yaitu dari kata *administratie* (bahasa Belanda) yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (*clerical work*).
2. Administrasi dalam arti luas berasal dari kata *administration* (bahasa Inggris).

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa administrasi dibagi menjadi dua pengertian yaitu dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Hal ini sejalan dengan pengertian administrasi secara sempit menurut beberapa ahli:

1. Administrasi Secara Sempit

Menurut Kamus Administrasi (2013: 1) menyatakan bahwa Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi: catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan ketik mengetik agenda dan sebagainya yang bersifat ketatausahaan.

Suherman (2014: 02) mengemukakan administrasi dalam arti sempit adalah:

Penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Data dan informasi yang dimaksud berhubungan dengan aktivitas organisasi, baik untuk kepentingan intern maupun ekstern. Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha (*clerical work, office work*).

Senada dengan pendapat tersebut Akadun (2009: 18) menyatakan bahwa: Secara sempit, administrasi diartikan sebagai pekerjaan-pekerjaan klerikal atau ketatausahaan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam pengertian sempit merupakan kegiatan ketatausahaan, surat menyurat atau kegiatan ketik dan mengetik agenda. Kemudian Administrasi yaitu kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagai mana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan pengertian administrasi secara luas menurut beberapa ahli:

2. Administrasi Secara Luas

Menurut Siagian yang dikutip Silalahi (1980: 9):

Mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerjasama demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sejalan dengan pendapat tersebut Akadun (2009: 18) mengemukakan

bahwa:

Secara luas administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan keorganisasian. Bahkan administrasi juga dapat diartikan sebagai pendayagunaan atau pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan keorganisasian.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian administrasi dalam arti luas. Menurut Siagian (Iskandar, 2014: 18) administrasi adalah: “keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih yang terlibat dalam satu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya”.

Pengertian administrasi menurut Gie yang dikutip oleh Silalahi (2005: 9) mengemukakan bahwa: Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama untuk mencapai tujuan.

Senada dengan pendapat tersebut, Atmosudirjo (1982: 40) mengemukakan sebagai berikut:

Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama, antara sekelompok orang-orang secara tertentu untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.

Selanjutnya Siagian (Thoha, 1990: 12) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian administrasi yaitu: “Keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Sedangkan Gie (Syafiie,2003: 4) mengartikan administrasi sebagai berikut: “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”.

Definisi administrasi yang dikemukakan Tead (Silalahi, 2009: 10), mengatakan bahwa:

Administrasi adalah meliputi kegiatan-kegiatan individu-individu (eksekutif) dalam satu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan dan menyediakan fasilitas usaha kerjasama kelompok individu-individu untuk merealisasikan tujuan yang ditentukan.

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

1. Adanya sekelompok orang, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dilakukan oleh lebih dari satu orang.
2. Adanya kerjasama, artinya kegiatan administrasi hanya mungkin terjadi jika dua orang atau lebih bekerjasama.
3. Adanya kegiatan, artinya kegiatan administrasi berlangsung dalam tahapan- tahapan tertentu secara berkesinambungan.
4. Adanya sarana dan prasarana, kegiatan administrasi juga akan lebih efektif dan efisien dengan tersedianya alat-alat penunjangnya.
5. Adanya tujuan yang ingin dicapai, artinya sesuatu yang diinginkan untuk dicapai melalui kegiatan kerjasama.

Sedikit tentang tujuan, terlalu sering orang beranggapan bahwa tujuan

proses administrasi harus selalu ditentukan oleh orang-orang yang bersangkutan langsung dengan proses itu. Tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh semua orang yang langsung terlibat oleh administrasi itu. Tujuan dapat pula ditentukan hanya sebagai dan mungkin pula oleh hanya seseorang dari mereka yang terlibat. Akan tetapi, bukanlah suatu hal yang mustahil pula bahwa oranglain lah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai.

Setelah diketahui, sebagaimana disebutkan di atas, maka pengertian administrasi yaitu suatu proses yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bekerja sama secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

1. Unsur-Unsur Administrasi

a) Administrasi Negara

a. Pengertian Administrasi Negara

Administrasi publik yang dikenal di Negara Indonesia dengan istilah Administrasi Negara. Administrasi negara merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan dan salah satu bagian pula dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama dengan perumusan kebijakan negara.

Oleh karena itu, Administrasi Negara sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan. Karena memang, Administrasi Negara berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan publik.

Menurut Pfiffner dan Presthus (Paimin dan Madiri, 2008: 32-33) mengatakan bahwa:

“in sum, public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques which give order and purpose to the efforts of large number of people”. (Secara menyeluruh, administrasi negara adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarah-pengarah kecakapan-kecakapan dan teknik-teknik yang tak terhingga jumlahnya yang memberi arah dan maksud terhadap usaha-usaha sejumlah besar orang).

Menurut Atmosudirjo (1994: 43) mengemukakan bahwa adanya tiga arti dari Administrasi Negara, yakni:

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai institusi politik (kenegaraan);
2. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas melayani pemerintah yakni sebagai kegiatan “pemerintah operasional” dan;
3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan Undang-undang.

Senada dengan pendapat Dimock dkk (2001: 5) mengemukakan bahwa:

Administrasi negara mempunyai dua arti, arti pertama administrasi negara dalam arti luas yaitu aktivitas-aktivitas badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam arti sempit adalah aktivitas badan eksekutif dalam melaksanakan pemerintahan.

Menurut Waldo yang dikutip Iskandar (2005: 8) mendefinisikan Administrasi negara sebagai berikut: Administrasi Negara adalah sebagai suatu organisasi dan manajemen dalam pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa suatu proses Administrasi negara meliputi seluruh kegiatan mulai saat menentukan tujuan yang akan dicapai sampai kepada penyelenggaraan mencapai tujuan tersebut. Dan administrasi sebagai suatu organisasi adalah merupakan wadah sekelompok orang

untuk bekerjasama secara formal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ciri-Ciri Administrasi Negara

Berikut ini diuraikan ciri-ciri yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi administrasi negara terutama bila dibandingkan dengan swasta. Menurut Thoha (2002: 47-48) ciri-ciri perbedaan tersebut adalah:

1. Pelayanan yang diberikan oleh Administrasi Negara bersifat urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi- organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut oleh organisasi lainnya, maka tidak akan jalan.
2. Pelayanan yang diberikan oleh Administrasi Negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Administrasi Negara dan administratornya relatif berdasarkan Undang-undang dan Peraturan. Hal ini memberikan warna legislasi dari Administrasi negara tersebut.
4. Administrasi negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar. Pelayanan oleh administrasi negara ditentukan oleh rasa pengabdian kepada masyarakat umum.
5. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Administrasi negara sangat tergantung pada penilaian rakyat yang dilayani.

Selanjutnya Thoha (2002: 48-49), mengemukakan perbedaan administrasi Negara dengan institusi-institusi yang lain, yaitu:

- a. Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak dapat dihindari
- b. Administrasi Negara memerlukan adanya kepatuhan.
- c. Administrasi Negara mempunyai ukuran tidak terbatas
- d. Pimpinan atasnya (*top management*) bersifat politis.
- e. Pelaksanaan administrasi Negara adalah sangat sulit diukur.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa administrasi Negara sangat erat berhubungan dengan kepentingan masyarakat, dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terlepas pada pengaruh politik.

c. Prinsip-prinsip Administrasi Negara

Prinsip adalah suatu pernyataan atau suatu kebenaran pokok yang memberikan petunjuk kepada pemikiran atau tindakan yang akan diambil. Prinsip merupakan dasar atau landasan untuk bertindak (Silalahi, 2009: 158).

Dalam penerapannya pada administrasi atau manajemen, prinsip-prinsip adalah fleksibel, karena harus disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang dapat berubah-ubah. Dan prinsip utama dari pada administrasi atau manajemen adalah “efisiensi” (daya guna) dan “efektivitas” (hasil guna) dalam mencapai tujuan yang direncanakan.

Agar tujuan atau hasil dapat dicapai secara efektif dan efisien, maka proses administrasi mengenal beberapa prinsip. Fayol yang dikutip Handyaningrat (1996: 32-34) menyebutkan prinsip-prinsip administrasi atau manajemen yaitu:

1. Pembagian pekerjaan (*division of work*)
2. Kewenangan dan tanggung jawab (*authority dan responsibility*)
3. Disiplin (*dicipline*)
4. Kesatuan perintah (*Unity of command*)
5. Kesatuan arah (*unity of direction*)
6. Mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi (*subordination of individual to general interest*)
7. Penggajian (*remuneration*)
8. Sentralisasi (*centralization*)
9. Skala hirarkhi (*scalar Chain*)
10. Tata tertib (*order*)
11. Keadilan (*equity*)
12. Stabilitas dari pada jabatan (*stability of tanure*)
13. Prakarsa (*initiative*)
14. Solidaritas antara kawan sekerja (*esprit de corps*)

Simon yang dikutip Iskandar (2005: 24) mengemukakan prinsip-prinsip umum mengenai administrasi sebagai berikut:

1. Efisiensi administrasi ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok.
2. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengatur anggota – anggota kelompok dalam suatu hirarki wewenang yang pasti.
3. Efisiensi di tingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
4. Efisiensi administrasi di tingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan a) tujuan b) proses, c) langganan, atau d) tempat.

Dalam membicarakan prinsip-prinsip ini, Fayol memberikan saran bahwa setiap kekakuan (*rigidity*) dalam administrasi tidak perlu ada atau absolut.

Menurut Fayol yang dikutip Handayani (1996: 34) semua prinsip administrasi / manajemen adalah luwes (*flexible*). Dan menyesuaikan dengan situasi yang ada

b) Organisasi

1) Pengertian Organisasi

Pada dasarnya setiap manusia memiliki keterbatasan dalam kemampuan, baik dari segi fisik, pengetahuan, waktu dan perhatian, sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan mengingat terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia untuk membagi pekerjaan, tugas dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggungjawab ini maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Disiplin administrasi akan terpusat pada penelaahan tentang organisasi, sebab fenomena kerja sama sebagai telaahan ilmu administrasi hanyalah fenomena kerja sama yang berhubungan dengan atau secara berlangsung

secara organisasional. Dan teori administrasi yang merupakan suatu teori yang mendasarkan pada perilaku kerja sama manusia dalam kelompok-kelompok kerja, pada akhirnya hanya ada dalam lingkungan organisasi yang disebut perilaku organisasi. Berbagai pengertian organisasi telah dirumuskan para ahli, diantaranya sebagai berikut:

Mengenai pengertian organisasi itu sendiri, Selznick (Tika, 2012: 4) mengemukakan sebagai berikut: *“organization is arrangement of personal for facilitating the accomplishment of some agreed purpose through the allocation of function and responsibilities”*. (Organisasi adalah pengaturan personil guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggung jawab)

Schein (Muhammad, 2014: 23) mengatakan bahwa: “Organisasi adalah suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab”.

Siagian yang dikutip Silalahi dalam buku Studi tentang ilmu administrasi, (1980: 124) menyatakan bahwa:

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara orang atau dua orang lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarkhi dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau kelompok orang yang di sebut bawahan.

Selanjutnya definisi organisasi menurut Dimock (Waluyo, 2007: 103) mengemukakan bahwa: “Organisasi adalah kerangka kerja dari fungsi-fungsi dan hubungan-hubungannya sebagai akibat dari komunikasi dan kerjasama, peranan,

pengaturan metode-metode koordinasi pada tingkat pemimpin”.

Berdasarkan uraian para ahli di atas mengenai pengertian organisasi, maka peneliti simpulkan bahwa organisasi merupakan suatu wadah, proses dan sistem kerjasama atau sistem hubungan antara dua orang atau lebih yang berinteraksi, saling mempengaruhi dan saling ketergantungan dalam menetapkan merumuskan dan menyusun hubungan-hubungan untuk memungkinkan orang-orang bekerjasama dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

2) Tujuan Organisasi

Tujuan adalah arah atau sesuatu yang hendak dicapai atau dipengaruhi yang menjadi sebab dilaksanakannya suatu kegiatan. Untuk mencapai tujuan organisasi menggunakan berbagai upaya. Menurut Silalahi (2009: 128), kegiatan organisasi di arahkan kepada dua dimensi tujuan, yaitu:

1. Tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keefektifan (*effectiveness*) adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit adalah yang berhubungan dengan tujuan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit. Efisiensi (*Efficiency*) adalah yang berhubungan dengan rasio output dengan input atau keuntungan dengan biaya. Adakalanya tujuan dapat di capai secara efektif ,tetapi tidak efisien, artinya tujuan dapat di capai tetapi terjadi pemborosan tenaga, dan waktu. Sebaliknya, bisa terjadi tujuan tersebut di capai secara efisien tetapi tidak efektif.
 2. Tercapainya Kepuasan dari anggota organisasi. Dalam proses pencapaian tujuan organisasi, setiap orang atau anggota yang bekerja atau terlibat dalam aktifitas organisasi harus diberikan kepuasan, sehingga mereka merasa sebagai anggota organisasi, dan hal tersebut akan mendorong orang tersebut untuk bekerja dalam kondisi dan motivasi yang produktif.
- Konsep tujuan organisasi dipandang secara luas mempunyai beberapa

fungsi penting yang bervariasi menurut waktu dan keadaan. Berbagai fungsi tujuan menurut Handoko (1999: 110-111) antara lain:

1. Pedoman bagi kegiatan,
2. Sumber legitimasi,

3. Standar pelaksanaan,
4. Sumber motivasi,
5. Dasar rasional pengorganisasian.

Melalui pendapat tersebut, penggambaran hasil-hasil akhir di waktu yang akan datang, tujuan organisasi berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan kegiatan para anggota organisasi. Dalam hal ini fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan mengenai apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan.

Tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya, dan disamping itu keberadaan di kalangan kelompok-kelompok seperti dipelanggan, politikus, karyawan, dan masyarakat pada umumnya. Pengakuan legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan di sekitarnya.

Bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami, hal ini akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi. Setelah organisasi menetapkan tujuan tujuan dalam bidang bidang yang dapat di kuantifikasikan seperti derajat kesuksesan yang dicapai dapat dengan mudah diukur.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi yang tidak terdapat sekarang tetapi untuk dicapai diwaktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Tujuan sangat penting di dalam perusahaan atau organisasi apapun, karena dengan adanya tujuan, organisasi tersebut mempunyai tolak ukur atas apa saja yang ingin di capai

atau di targetkan sesuai dengan tujuan itu sendiri. Organisasi tidak bisa berdiri tanpa adanya tujuan adapun sebaliknya tujuan juga tidak ada kalau tidak adanya organisasi.

3) Prinsip Organisasi

Setiap organisasi, baik publik maupun bisnis, perlu disusun dan dijalankan berdasarkan asas-asas tertentu agar dapat dicapai hasil yang efisien dan efektif. Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi pimpinan organisasi atau administrator atau manajer dalam menjalankan tugas-tugas manajerial umumnya dan tugas pengorganisasian pada khususnya.

Silalahi (2009: 131) mengemukakan beberapa prinsip organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan yang jelas.
2. Spesilaisasi.
3. Koordinasi.
4. Wewenang.
5. Tanggung jawab.
6. Keseimbangan.
7. Delegasi.
8. Kesatuan komando.
9. Jenjang hierarki.
10. Rentang kontrol.

Adapun prinsip-prinsip organisasi dikemukakan oleh Syamsi (1994: 14), antara lain sebagai berikut:

1. Perumusan tujuan yang jelas (*formulation of the objectivies*)
2. Pembagian tugas pekerjaan (*devision of work*)
3. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab (*delegation of authority and responsibility*)
4. Banyaknya tingkat hierarkies (*level of hierarchy*)
5. Rentangan pengawasan (*span of control*)
6. Memahami akan tugas masing-masing dan kaitan tugas secara keseluruhan (*understanding by the individual of his own task and task and the task of whole*).

Sedangkan asas-asas manajemen dari Fayol (Sutarto, 1993: 1) yang dikenal dengan sebutan “14 asas-asas manajemen” adalah sebagai berikut:

1. *Division of work* (pembagian kerja)
2. *Authority and responsibility* (wewenang dan tanggung jawab)
3. *Discipline* (disiplin)
4. *Unity of Command* (kesatuan perintah)
5. *Unity of Direction* (kesatuan arah)
6. *Subordination of individual interest to general interest* (kepentingan individual dibawah kepentingan kelompok)
7. *Remuneration (pay) of personnel* (gaji pegawai)
8. *Centralization* (sentralisasi)
9. *Scalar chain*
10. *Order* (ketertiban)
11. *Equity* (keadilan)
12. *Stability of tenure of personnel* (kestabilan masa kerja pegawai)
13. *Initiative* (inisiatif)
14. *Asprit de corp* (kesatuan jiwa korp)

4) Asas-asas Organisasi

Setiap organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi bisnis perlu disusun dan dijalankan berdasarkan asas-asas tertentu agar dapat dicapai hasil yang efektif dan efisien. Asas atau prinsip mempunyai dua arah pikiran petunjuk kepada pemikiran atau tindakan, yaitu:

- a. Merupakan pangkal tolak pikiran untuk memahami suatu tata hubungan atau kasus.
- b. Merupakan suatu cara atau sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan sesuai dengan kondisi yang dikehendaki (Silalahi, 2009: 131).

Asas-asas tersebut menjadi pedoman bagi pimpinan organisasi atau administrator atau manajer dalam menjalankan tugas-tugas manajerial umumnya dan tugas pengorganisasian khususnya.

c) Manajemen

1) Pengertian Manajemen

Dalam sebuah organisasi pasti akan ada proses manajemen untuk mengelola setiap sumber daya yang ada di suatu organisasi atau perusahaan. Kegiatan manajemen tersebut akan sangat penting dan mempengaruhi kegiatan-kegiatan organisasi.

Robbins (1999: 8) mengemukakan bahwa: Manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

Selanjutnya menurut Terry (1964: 50) mengemukakan bahwa:

Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human beings and other resources (Manajemen adalah proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Murtie (2012: 3) mengatakan bahwa: Manajemen adalah suatu keadaan yang terdiri dari proses yang ditunjukkan oleh garis (line) yang mengarah pada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas sangat jelas mengenai istilah manajemen. Istilah-istilah yang dikemukakan oleh setiap ahli memiliki perbedaan tetapi jika ditelaah lebih mendalam beberapa definisi manajemen diatas memiliki kesamaan

yaitu adanya *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dan fungsi tersebut dijadikan fungsi mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses atau serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam memanfaatkan atau mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

2) Fungsi-fungsi Manajemen

Untuk memperoleh pemahaman yang sama terhadap variabel-variabel penelitian sebagai landasan teoritis yang dikemukakan berbagai pendapat dan definisi ahli mengenai fungsi manajemen tersebut sebagai berikut:

Menurut pendapat Siagian (1986: 106) membagi fungsi manajemen kedalam lima bagian yaitu:

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Pemberian motivasi (*Motivating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)
5. Penilaian (*Evaluation*)

Selanjutnya Terry yang dikutip Siagian (2014: 88) mengemukakan fungsi manajemen kedalam empat bagian yaitu:

- a. *Planning* (Perencanaan)
Yaitu menetapkan yang harus dilakukan oleh anggota organisasi untuk menyelesaikan pekerjaan. Pada fase ini perlu ditetapkan oleh manajer bagaimana pekerjaan harus dilaksanakan.
- b. *Organizing* (Pengorganisasian)
Yaitu mendistribusikan atau mengalokasikan tugas-tugas kepada anggota kelompok atau bawahan, mendelegasikan kekuasaan dan menetapkan hubungan kerjasama antara anggota kelompok atau bawahan.
- b. *Actuating* (Penggerakkan)
Yaitu menggerakkan kelompok secara efisien dan efektif kearah pencapaian tujuan. Dalam menggerakkan berbagai sarana kegiatan

manajer yang menyebabkan organisasi itu bergerak.

c. *Controlling* (Pengawasan)

Yaitu mengadakan pengawasan atau pengendalian kepada organisasi yang sedang berjalan agar jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik arahnya maupun caranya.

Fungsi manager (*the function of manager*) menurut Koontz dan O'Donnel dalam bukunya "*The Principle of Management*" dengan akronim (POSDICO) (Handayani, 1985: 22) yaitu:

1. Perencanaan (*planning*)
2. Pengorganisasian (*organizing*)
3. Penyusunan Pegawai (*Staffing*)
4. Pembinaan Kerja dan Kepemimpinan (*Directing and Leading*)
5. Pengawasan (*controlling*)

Dari beberapa fungsi-fungsi manajemen di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya dan dilaksanakan secara sistematis. Kesalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan salah satu fungsi manajemen akan berpengaruh terhadap yang lainnya yang dapat mengakibatkan tujuan organisasi tidak tercapai.

d) **Manajemen Sumber Daya Manusia**

a. **Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia**

Salah satu cabang manajemen yang menarik perhatian secara khusus terhadap sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hal-hal yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia oleh kalangan pimpinan suatu organisasi adalah mutlak diperlukan. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) mempunyai kekhususan

dibandingkan dengan manajemen secara umum atau manajemen sumber daya lain. Karena yang dikelola adalah manusia maka keberhasilan atau kegagalan manajemen sumber daya manusia akan mempunyai dampak yang sangat luas.

Sebelum membahas secara lebih mendalam mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia, dapat dikemukakan bahwa dalam manajemen sumber daya manusia dijumpai 2 (dua) pengertian utama, yaitu: (1) manajemen, (2) sumber daya manusia.

1. Manajemen, berasal dari kata *to manage* (bahasa Inggris) yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengelola.
2. Sumber daya manusia, merupakan salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi.

Jadi secara sederhana pengertian sumber daya manusia adalah mengelola sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang terdapat dalam suatu organisasi. Mengenai pengertian manajemen sumber daya manusia secara lebih mendalam.

Hasibuan (2012: 10) mengemukakan pengertian manajemen sumber daya manusia adalah: “ ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan dan masyarakat”.

Menurut Sofyandi (2013: 6) menyatakan bahwa:

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) didefinisikan sebagai suatu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling*, dalam setiap aktivitas/fungsi operasional SDM mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga

pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari SDM organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Mangkunegara (2011: 2) mengemukakan bahwa:

Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat diperoleh pemahaman

bahwa manajemen sumber daya manusia dapat diartikan sebagai seni dan ilmu dan mendayagunakan sumber daya manusia berdasarkan fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berdaya guna dan berhasil guna.

b. Maksud dan Tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) mempunyai berbagai maksud dan tujuan yang menjelaskan pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Maksud dari manajemen sumber daya manusia

Meningkatkan kontribusi yang produktif dari karyawan kepada organisasi melalui tanggungjawab strategis, etis dan sosial. Maksud ini menuntun proses pembelajaran dan praktik manajemen sumber daya manusia menggambarkan usaha-usaha yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari manajer pelaksana dan menunjukan bagaimana profesionalisme karyawan mendukung usaha tersebut.

2. Tujuan Manajemen sumber daya manusia

Tujuan dari manajemen sumber daya manusia tidak hanya diperlukan untuk memberikan gambaran tujuan dari manajemen puncak, tetapi juga merupakan penyeimbang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh organisasi yang meliputi fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia, masyarakat, dan karyawan yang dipengaruhi oleh tantangan-tantangan tersebut. Menurut Sofyandi (2013: 9) Tujuan-tujuan manajemen sumber daya manusia terdiri dari empat tujuan yaitu:

- a. Tujuan Organisasional
- b. Tujuan Fungsional
- c. Tujuan Sosial
- d. Tujuan Personal

c. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Good Governance

Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan *Good Governance*, Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia hendaknya dapat melihat secara utuh, balik dalam dimensi kehidupan lahiriah maupun batiniah (Sulistiyani, 2004: 35). Dengan demikian, Manajemen Sumber Daya Manusia dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan *Good Governance* pada UPTD Pengendalian Penduduk. *Good Governance* dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan suatu pemerintahan yang mempunyai proses dan tahapan tertentu demi tercapainya suatu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik, baik itu dipusat maupun di daerah agar dapat

bekerjasama dengan baik dan terselenggaranya tujuan yang diinginkan masyarakat.

Masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan perwujudan *Good Governance*, masyarakat semacam ini juga akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan, selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan pemerintahan. Merujuk pada istilah *Good Governance* itu sendiri adalah pemerintahan yang baik, (Trianto, 2007: 321). Sebenarnya *Good Governance* bukan hanya mencakup konteks pemerintah saja tapi meluas kepada masyarakat dan sector swasta. Ini ditegaskan oleh Sedarmayanti (2007: 2) menyatakan bahwa “*Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindungi, *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu Negara/Pemerintahan (*State*), Sektor Swasta/dunia usaha (*Private Sectors*), dan Masyarakat (*Society*)”.

Kaufmann, dkk (2005: 189) Mendefinisikan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai tradisi dan institusi dimana kewenangan di sebuah Negara dilaksanakan yaitu: proses dimana pemerintahan dipilih, dimonitor dan diganti. Kemampuan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan suatu kebijaksanaan secara efektif dan Rasa hormat warga Negara dan pemerintah terhadap institusi yang mengontrol interaksi dan social diantara mereka.

Menurut Word Bank (2000), *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran penciptaan kerangka hokum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas swasta.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah nomor 101 Tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip Profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima seluruh masyarakat.

Dengan demikian, *Good Governance* adalah suatu tindakan/tingkah laku pemerintah yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, masalah public dalam kehidupan sehari-hari disegala bidang secara baik dan bertanggungjawab.

Salah satu prinsip dari *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang baik) adalah Partisipasi Masyarakat. Partisipasi masyarakat diartikan sebagai proses yang melibatkan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan, perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat.

e) **Partisipasi**

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau definisi. Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian. Hal ini menunjukkan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan. Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu participation ialah kata

benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, “participation” adalah hal mengambil bagian.

Menurut Salusu (1998: 104) : “Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu”. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif– motif dan keyakinan akan nilai–nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Menurut Juliantara (2002: 87) mengemukakan bahwa:

Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, UNIVERSITAS MEDAN AREA sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah : Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Menurut Syamsuddin Adam dalam Prasetya, 2008:54, Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, akses dan control (Juliantara, 2002: 90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah :

1. Voice, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. Access, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. Control, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Partisipasi adalah hal ikut sertanya setiap orang suatu kegiatan Merupakan aktivitas dalam organisasinya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat dalam kedudukannybagai subyek pembangunan dituntut dalam memberikan sumbangan terhadap apa yang dibutuhkan dalam pembangunan. Kesiadaan memberikan sumbangan ini bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong Oleh motivasi-motivasi tertentu yang dicapai.

Disamping juga adanya upaya-upaya yang kita lakukan oleh pemerintah dalam membangkitkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan adalah fungsi pemerintah, sebagaimana dijelaskan oleh S.P Siagaan bahwa penggerakan adalah

merupakan keseluruhan dari proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien serta ekonomis.

Terlepas dari peranan pemerintah dalam menggerakkan partisipasi tersebut juga terdorong oleh adanya motivasi tertentu. Motivasi-motivasi yang juga dimaksudkan itu dapat kita lihat pada penjelasan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan banyak sekali ditentukan oleh :

1. Kebutuhannya, dimana kebutuhan manusia itu adalah yang terpenting sehingga masyarakat membutuhkan banyak hal yang dapat mendorong partisipasinya itu sendiri.
2. Interst masyarakat, ketertarikan masyarakat menjadi salah satu dorongan yang cukup kuat pula dalam meningkatkan partisipasinya, semakin besar ketertarikan masyarakat semakin tinggi pula partisipasi yang diberikan.
3. Adat istiadat dan sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain Menyimak penjelasan tersebut maka jelas bahwa masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena itu merupakan kebutuhan di dalamnya memuat berbagai kepentingan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga sangat dipengaruhi oleh tingkat interaksi antara masyarakat itu sendiri dengan pemerintah. Interaksi yang dimaksud disini adalah adanya hubungan saling pengertian dan saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa ada hal tersebut maka pembangunan yang merupakan kebijakan pemerintah sulit diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Menurut Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Menurut Poerbakawatja (1981: 251) partisipasi adalah: Suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan di dalam perencanaan serta

pelaksanaan dari segala sesuatu yang berpusat pada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

B. Kaitan Administrasi Negara dengan Variabel Penelitian

Partisipasi secara umum diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat telah diatur Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Verhagen dalam Mardikanto dan Poerwoko, 2015 menyatakan bahwa: Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggungjawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran

yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai:

1. kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki;
2. kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri;
3. kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan;
4. kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan;
5. adanya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Mulyadi dalam Igrisia, 2008 menjelaskan dua makna partisipasi, yaitu:

“Partisipasi instrumental dan partisipasi transformasional. Partisipasi disebut instrumental ketika dipandang sebagai cara untuk mencapai sasaran tertentu untuk proyek pembangunan, partisipasi transformasional jika dilihat dari cara atau sarana yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Dalam partisipasi instrumental, inisiatif pelaksanaan proyek atau aktifitas misalnya datang dari pihak luar, sedangkan masyarakat ikut dalam bentuk kemitraan, tujuan pelaksanaan proyek tersebut ialah kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan, dan tujuan partisipasi masyarakat di dalamnya ialah pencapaian saran-saran proyek tersebut secara efektif dan efisien. Asumsi partisipasi semacam ini ialah bahwa para perencana lebih tau apa yang terbaik bagi masyarakat, dan masyarakat tinggal melaksanakannya secara bersama-sama serta menikmati hasilnya. Dengan kata lain, proses pengambilan kebijakan berlangsung dari atas ke bawah (*top down*). Partisipasi transformasi masyarakat terlibat sebanyak mungkin dalam pelaksanaan suatu proyek atau aktifitas, mulai tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Suatu proyek atau aktifitas merupakan pencerminan kehendak masyarakat, dan proses pengambilan kebijakan berlangsung dari bawah ke atas (*bottom up*). Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran suatu proyek sebagian besar bergantung pada masyarakat sendiri”.

Partisipasi menurut Isbandi (Widodo, 2015) merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat, mengambil keputusan dan memilih alternatif sebagai solusi dalam penanganan masalah, melaksanakan alternatif yang dipilih, dan melibatkan masyarakat dalam proses perubahan yang terjadi.

Dengan demikian, partisipasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan

proses dalam organisasi. Oleh karena itu, agar pelaksanaan dalam organisasi dapat dilakukan dengan efektif dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan maka keberadaan partisipasi masyarakat sangat mendukung berbagai kebijaksanaan, keberhasilan penyelenggaraan setiap kegiatan, dan usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi.

Kaitan Administrasi Negara dengan Penelitian yang peneliti lakukan ini mengingat bahwa salah satu ruang lingkup administrasi negara adalah adanya hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat itu sendiri dapat dijadikan sebagai landasan menjalin hubungan baik antara internal dengan eksternal, sehingga ke depannya akan terjalin kerjasama dan kesadaran masyarakat dalam mendukung kegiatan atau program yang dilaksanakan pemerintah guna menciptakan program pembangunan nasional yang berdaya guna sesuai dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Maka dari itu Peneliti menganggap bahwa penelitian yang peneliti lakukan yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) berhubungan erat dengan program studi yang penulis ikuti yaitu Administrasi Negara.

C. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB)

1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi seringkali dikaitkan dengan kegiatan pembangunan. Pembangunan juga diartikan sebagai perubahan kepada hal yang lebih baik. Sementara istilah partisipasi tersebut akan

lebih jelas maknanya apabila secara langsung dikaitkan dengan gerak pembangunan itu sendiri. Dengan demikian, hal ini berkaitan dengan kegiatan menumbuhkan kesadaran masyarakat desa agar mereka tergerak untuk mengadakan perubahan secara aktif menuju kearah yang lebih baik. Kegiatan pembangunan di pedesaan seringkali dihadapkan dengan persoalan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Oleh sebab itu, diperlukan adanya dorongan dan inovasi untuk dapat mewujudkan partisipasi sebagai langkah untuk peningkatan pembangunan dengan memiliki modal manusia.

Keberhasilan penyelenggaraan organisasi atau pemerintahan tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakatnya, karena Masyarakat itu sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan bagian integral yang sangat penting. Partisipasi dibutuhkan agar sinergitas antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik dalam pencapaian tujuan kebijakan. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kepedulian dan kesadaran serta tanggungjawab masyarakat terhadap pentingnya program dari pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka.

Partisipasi berasal dari bahasa inggris *participate* yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian (Whillie Wijaya, 2004: 208).

Menurut Charly dalam Rohman (2009: 46), bahwa:

“Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawaban”.

Menurut Kencana (2002: 132) mengatakan bahwa: Partisipasi adalah

penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama.

Trisantono (2011: 4) mengatakan partisipasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Partisipasi masyarakat menurut Sumardi (Andreeyan, 2014) berarti: Peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dalam bentuk memberikan pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, hal ini dapat berupa memberi masukan pikiran, tenaga, keahlian, waktu, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan.

Sedangkan menurut Mubyarto (Putri, 2010) mengatakan bahwa: Partisipasi masyarakat yaitu suatu komitmen dalam membantu keberhasilan suatu program yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan sendiri.

Webster (Arzaq dan Tauran, 2015) menyatakan partisipasi merupakan tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan yang dimaksud memperoleh manfaat. Dengan demikian, konsep partisipasi menjadi semakin luas mulai dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai penerimaan manfaat. Sedangkan Griesgraber dan

Gunter (Muluk, 2007) mengartikan partisipasi sebagai mekanisme untuk memungkinkan orang-orang yang terkena dampak untuk berbagi dalam pembuatan proyek atau program, dimulai dengan identifikasi semua jalan sampai ke implementasi dan evaluasi.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah:

Pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah:

keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi

Sedangkan menurut Sumarto, (2003: 17) mengatakan bahwa:

Partisipasi masyarakat atau partisipasi warga adalah proses ketika warga, sebagai makhluk individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan pelaksanaan dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Selain itu Alastaire White (dalam Sunarti, 2003: 76-77, mengemukakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan untuk masyarakat).

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (dalam Siti Fatimah, 2012: 10):

Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta, yaitu mengikuti dan

menyertai pemerintah karenakenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharap dapat ikut serta, karena di seleggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri, untuk rakyat banyak.

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas berupa perencanaan, pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis.

Sulaiman (Paath, 2013) membagi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menjadi lima, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
2. Partisipasi langsung dalam kegiatan secara fisik dan tatap muka.
3. Partisipasi representatif yaitu dengan memberikan kepercayaan dan mandat kepada wakil-wakil dalam organisasi atau panitia.
4. Partisipasi dalam bentuk dukungan dapat berupa keterlibatan mental, emosional individu dan motivasi untuk memberikan kontribusi tergerak dalam bentuk buah pikiran, tenaga, barang dan jasa yang merupakan hak dasar yang sah bagi setiap individu dalam kesediaannya untuk turut serta menentukan keberhasilan suatu program pembangunan.
5. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, yaitu memanfaatkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Dusseldorp (Mardikanto dan Poerwoko, 2015) mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat, yakni :

1. Menjadi anggota dalam kelompok-kelompok masyarakat;
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;

6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Slamet (Mardikanto dan Poerwoko, 2015) berpendapat bahwa ada tiga unsur pokok yang sangat menentukan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Riwu Kaho (2017: 127) membagi partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkaitan tentang pemberian gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Ada tiga jenis keputusan:
 - a. Keputusan Awal (*Initial Decisions*), keputusan awal diawali dengan identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada pada masyarakat kemudian diberikan suatu solusi atas permasalahan tersebut. Keputusan awal ini mencakup pada gagasan, formulasi, perumusan rencana dan lainnya dalam menunjang pelaksanaan suatu program.
 - b. Keputusan yang sedang Berlangsung (*On going Decisions*), keputusan yang sedang berlangsung terjadi setelah keputusan awal telah dibuat. Ada kemungkinan bahwa penduduk setempat yang tidak berpartisipasi dalam keputusan awal mungkin akan diminta berpartisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung begitu proyek telah tiba di wilayah tersebut. Partisipasi dalam keputusan yang sedang berlangsung untuk mengetahui kebutuhan dan prioritas baru yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan program dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - c. Keputusan Operasional (*Operational Decisions*), keputusan operasional terkait dengan organisasi yang dibentuk berperan untuk melibatkan masyarakat dalam pencapaian suatu program. Partisipasi ini berkaitan dengan hal-hal seperti komposisi keanggotaan, prosedur rapat, pemilihan kepemimpinan dan lainnya.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek implementasi dalam tiga cara utama yaitu kontribusi sumber daya, upaya administrasi dan koordinasi dan program kepesertaan.
 - a. Kontribusi Sumber Daya (*Resource Contributions*) ada berbagai bentuk, seperti penyediaan tenaga kerja, uang, barang material, dan informasi. Semua input tersebut sangat penting untuk sebuah program pembangunan. Melalui partisipasi tersebut, masyarakat setempat dapat berkontribusi tenaga kerja untuk melakukan kegiatan

fisik, menyumbangkan alat untuk kegiatan atau memberikan informasi penting tentang topik seperti hasil dari program atau masalah yang dihadapi dan sebagainya.

- b. Upaya Administrasi dan koordinasi (*Administration and co-ordination efforts*) adalah cara kedua masyarakat dapat terlibat dalam implementasi proyek. Disini mereka dapat berpartisipasi sebagai lokal dipekerjakan karyawan atau sebagai anggota atau pengambil keputusan proyek. Mereka juga dapat menjadi anggota asosiasi sukarela yang memainkan peran dalam mengoordinasi kegiatan mereka dengan proyek tersebut.
 - c. Program Kepesertaan Kegiatan (*Programme Enlistment Activities*) merupakan bentuk partisipasi implementasi yang paling umum. Menjadi peserta dalam program sangat penting untuk melihat manfaat yang disediakan, karena pendaftaran tidak selalu menjamin manfaat.
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dapat dilihat dari tiga macam manfaat yaitu materi, sosial dan pribadi. Manfaat material pada dasarnya adalah barang pribadi yang menghasilkan dari suatu proyek. Manfaat sosial pada dasarnya adalah barang publik. Manfaat ini biasanya dicirikan sebagai layanan atau fasilitas seperti sekolah, klinik kesehatan dan jalan yang baik. Manfaat pribadi bukan berarti manfaat secara individu, keuntungan pribadi dalam hal ini seperti kepada anggota kelompok atau sektor karena ini memperoleh kekuatan sosial dan politik yang lebih banyak melalui pengoperasian proyek.
 - 4) Partisipasi dalam evaluasi, yaitu mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya. Tahap ini sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan program ataupun kegiatan selanjutnya. Terdapat dua tipe partisipasi dalam evaluasi program yaitu dengan partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.
 - a. Partisipasi Langsung, dalam suatu proyek orang-orang lokal atau pemimpin lokal dapat berpartisipasi. Pegawai pemerintah dapat berpartisipasi dalam tinjauan anggaran tahunan yang memenuhi fungsi evaluatif tertentu, tetapi pejabat tingkat lokal umumnya tidak terlibat. Sangat mungkin bahwa apapun upaya dan keterlibatan lokal dalam evaluasi program akan terjadi melalui kegiatan politik atau sejenisnya.
 - b. Partisipasi tidak Langsung, adalah partisipasi dalam kegiatan evaluatif yang bertujuan untuk mengupayakan memberikan pendapat yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dari sebuah program untuk menyarankan beberapa perbaikan.

Menurut Slamet (1994: 97), ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Faktor Internal, dimana meliputi: Pengetahuan dan Keahlian, Pekerjaan Masyarakat, Tingkat Pendidikan atau buta huruf, Jenis Kelamin, usia, kepercayaan budaya.
2. Faktor Eksternal, dimana meliputi: Hubungan stakeholder dan Pihak yang berpengaruh pada program atau kegiatan tertentu.

Tingkatan partisipasi masyarakat juga menjadi hal penting dalam memutuskan suatu kebijakan tertentu. Ada 3 tingkat utama dan 8 sub tingkatan menurut Arnstein dalam Rohman(2009: 47), yaitu:

- a. *Citizen Control*: yaitu masyarakat mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasinya.
- b. *Delegated Power*: berarti pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya dalam suatu program pembangunan.
- c. *Partnership*: adanya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam program pembangunan.
- d. *Placation*: melibatkan warga untuk menjadi anggota komite dalam program namun hak memutuskan tetap berada pada pemerintah.
- e. *Consultation*: adanya komunikasi dua arah seperti survey sikap, pertemuan warga, dan dengar pendapat.
- f. *Information* : hanya ada komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat seperti pengumuman, pamflet, poster, laporan tahunan
- g. *Therapy*: bertujuan tidak untuk mendorong rakyat untuk berpartisipasi melainkan untuk mendidik rakyat.
- h. *Manipulation* : Masyarakat diarahkan agar tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya diarahkan untuk berperan serta.

Menurut Rohman (2009: 47) ada 3 (tiga) bentuk partisipasi seperti:

- a. Sumbangsihnya terhadap usaha pembangunan;
- b. Penerimaan manfaat secara teratur; dan
- c. Pengambilan keputusan yang menyangkut pelaksanaan program pembangunan sosial ekonomi.

Mengacu pada pandangan ini, partisipasi dibedakan menjadi dua hal, authentic participation (partisipasi otentik) yang merujuk pada terpenuhinya ketiga kriteria tersebut. Jika seluruh kriteria tersebut tidak dapat dipenuhi maka hal ini

akan disebut *pseudo participation* (partisipasi semu).

Menurut dwiyanto (2002: 23) ada upaya-upaya dalam mengatasi berbagai hambatan yang mempengaruhi proses partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dengan cara *customer's charter*, sebagai berikut:

- a. Formulasi
- b. Promosi
- c. Perbaikan Pelayanan
- d. Monitoring
- e. Evaluasi

2) **Program Bina Keluarga Balita (BKB)**

a. **Pengertian Program Bina Keluarga Balita (BKB)**

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW (Pedoman Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Tahun 2006). Selain itu, Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) pada umumnya terdiri dari keluarga muda dengan anggota yang mempunyai anak batita atau anak balita.

Untuk memberdayakan keluarga Batita (Bawah Usia Tiga Tahun) dan keluarga Balita (Bawah Usia Lima Tahun), seluruh jajaran pembangunan, termasuk kekuatan keluarga yang tergabung dalam Posdaya diarahkan agar setiap

keluarga member prioritas yang tinggi terhadap kesehatan dan pertumbuhan anak balitanya. Orang tua dalam Posdaya dapat disiapkan untuk menyegarkan kembali Gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) sebagai gerakan bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk memelihara kesehatan, hantaran tumbuh kembang anaknya, deteksi dini kelainan atau kecacatan dan akhirnya menyiapkan anak balitanya siap sekolah bersama anak-anak lain.

Program Bina Keluarga Balita (BKB) masih ada kaitannya dengan Posyandu yang pendekatannya adalah pendidikan orang tua (ibu), yaitu pendidikan yang ditujukan bagi para ibu untuk lebih mengenal tentang perilaku dan etika dalam mendidik anaknya. Program Bina Keluarga Balita (BKB) dicanangkan Bapak Soeharto pada hari ibu tahun 1981. Program ini merupakan suatu program yang melengkapi program-program pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan seperti misalnya program-program perbaikan kesehatan dan gizi ibu dan anak. Pelaksanaan program Bina Keluarga Balita (BKB) dimulai pada tahun anggaran 1985/1986. Hal ini berdasarkan pengarahan Ibu Negara pada tanggal 21 Juli 1984 melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Negara UPW dan Kepala BKKBN No. 11 KEPMEN UPW/IX/84 dan No. 170/HK010/E3/84 tentang kerjasama pelaksanaan pengembangan proyek Bina Keluarga Balita (BKB) dalam keterpaduan dengan program Keluarga Berencana.

Program Bina Keluarga Balita merupakan sebuah program dari pemerintah dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang anak balita secara optimal (kb.wordpress.com). Program BKB merupakan bagian integral dari upaya nasional dalam rangka mewujudkan manusia Indonesia

seutuhnya. “Program Bina Keluarga Balita (BKB) di koordinasikan oleh Kantor Menteri Urusan Peranan Wanita, penanggungjawab di lapangannya adalah Badan Koordonasi Keluarga Berencana Nasional serta memperoleh bantuan dari UNICEF (Patmonodewo, 2003: 84)”.

b. Ciri Khusus Program Bina Keluarga Balita (BKB)

Program Bina Keluarga Balita (BKB) memiliki beberapa ciri utama diantaranya sebagai berikut:

- a. Menitikberatkan pada pembinaan ibu dan anggota keluarga lainnya yang memilik balita;
- b. Membinan Tumbuh kembang anak;
- c. Menggunakan alat bantu seperti Alat Permainan Edukatif (APE), dongeng nyanyian sebagai perangsang tumbuh kembang anak;
- d. Menekankan pada perkembangan manusia pada usia dini, baik fisik maupun mental;
- e. Tidak langsung ditunjukan kepada balita; dan
- f. Meningkatkan keterampilan ibu dan anggota keluarga lainnya agar dapat mendidik balitanya. (BKKBN: 2007)

c. Tujuan Program Bina Keluarga Balita (BKB)

Program Bina Keluarga Balita (BKB) dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut (BKKBN:2007):

- a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu dan anggota keluarga lainnya tentang:
 - Proses tumbuh kembang balita dalam aspek fisik, mental dan sosial;
 - Pelayanan yang tepat dan terpadu yang tersedia bagi anak misalnya di Posyandu.
- b. Meningkatkan keterampilan ibu dan anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan tumbuh kembang anak secara optimal, antara lain dengan stimulus mental dengan menggunakan Alat Permainan Edukatif (APE) dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia.

Tujuan dari program Bina Keluarga Balita ini adalah untuk meningkatkan keterampilan dan sikap orang tua serta keluarga untuk mempersiapkan pendidikan anak usia 0 (nol) sampai dengan usia di bawah 5 (lima) tahun dalam mengasuh dan mendidik anak balitanya. Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan upaya untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera.

d. Sasaran Program Bina Keluarga Balita (BKB)

Program Bina Keluarga Balita (BKB) ditujukan pada keluarga atau orang tua yang memiliki anak balita usia 0-5 tahun. Menurut Suyanto (2005), perkembangan anak dimulai sejak dalam kandungan dan dilanjutkan pada usia dini. Oleh karena itu, penting bagi para ibu yang memiliki anak usia dini mendapatkan intervensi (*parent intervention*), seperti pemberian wawasan tentang kehamilan, gizi, dan cara merawat dan mendidik anak usia dini (0-8 tahun) sering dikenal dengan istilah *golden age* atau tahun emas, disinilah anak sedang dalam tahap pertumbuhan baik fisik maupun mental yang paling pesat. Usia dini dianggap penting karena dimasa ini mudah untuk menanamkan dasar-dasar kepribadian yang baik bagi anak-anak. Sasaran dari Program Bina Keluarga Balita (BKB) ini adalah Ibu dan atau anggota keluarga lainnya yang mempunyai anak balita.

e. Kegiatan Program Bina Keluarga Balita (BKB)

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dilakukan satu kali dalam sebulan. Penanggung jawab umum gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) adalah Lurah atau Kepala Desa. Bina Keluarga Balita (BKB) direncanakan dan dikembangkan oleh kader, LPMK dan PKK serta Tim Pembina Keluarga Berencana tingkat

kecamatan. Penyelenggaraannya dilakukan oleh kader terlatih berasal dari anggota masyarakat yang bersedia secara sukarela bertugas memberikan penyuluhan kepada sasaran gerakan Bina Keluarga Balita (BKB). Bina Keluarga Balita (BKB) dilaksanakan untuk membina ibu kelompok sasaran yang mempunyai anak balita. Ibu sasaran ini, dibagi menjadi 5 kelompok menurut umur anaknya, yaitu:

1. Kelompok ibu dengan anak umur 0-1tahun
2. Kelompok ibu dengan anak umur 1-2tahun
3. Kelompok ibu dengan anak umur 2-3tahun
4. Kelompok ibu dengan anak umur 3-4tahun
5. Kelompok ibu dengan anak umur 4-5tahun

Pembagian kelompok umur ini sesuai dengan tugas perkembangan anak, dimana tiap-tiap kelompok umur tersebut mempunyai tugas perkembangan anak (Soetjiningsih,1995). Bina Keluarga Balita (BKB) sebaiknya berada pada tempat yang mudah didatangi oleh masyarakat dan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dapat dilaksanakan di pos pelayanan yang telah ada, rumah penduduk, balai desa, tempat pertemuan RT (Rumah Tangga) atau di tempat khusus yang dibangun oleh masyarakat.

Adapun kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dilakukan oleh kader yang terlatih dengan 3 kegiatan: (BKKBN, 2007).

1. Penyuluhan Bina Keluarga Balita(BKB)

Pertemuan penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB) adalah forum pertemuan yang diselenggarakan oleh kader dan ibu peserta sebagai wadah penyampaian pesan dari kader kepada ibu peserta (BKKBN,1992).

- Materi Penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB)

Isi materi pada kegiatan penyuluhan Bina Keluarga Balita (BKB) berbeda pada setiap kelompok umur balita. Hal ini sesuai dengan tugas perkembangan anak yang berbeda masing-masing kelompok umur, sehingga cara stimulasi maupun media yang diperlukan untuk interaksi antara ibu dan anak pun berbeda. Pada Program Bina Keluarga Balita (BKB), secara garis besarnya materi penyuluhan diantaranya (BKKBN, 2007):

- Materi I : Integrasi KB dengan BKB
- Materi II : Konsep diri ibu dan peran ibu dalam pendidikan balita
- Materi III : Proses tumbuh kembang anak
- Materi IV : Gerakan kasar
- Materi V : Gerakan halus
- Materi VI : Komunikasi Pasif
- Materi VII : Komunikasi Aktif
- Materi VIII : Kecerdasan

2. Bermain APE (Alat Permainan Edukatif)

APE (Alat Permainan Edukatif) adalah alat permainan yang dapat mengoptimalkan perkembangan anak disesuaikan dengan usianya dan tingkat perkembangannya, serta berguna untuk (Soetjiningsih, 1995):

- Pengembangan aspek fisik, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang atau merangsang pertumbuhan fisik anak.
- Pengembangan bahasa, dengan melatih berbicara, menggunakan kalimat yang benar.
- Pengembangan aspek kognitif, yaitu dengan pengenalan suara, ukuran, bentuk, warna, dan lain-lain.
- Pengembangan aspek sosial, khususnya dalam hubungannya dengan interaksi antara ibu dan anak, keluarga dan masyarakat.

3. Pencatatan hasil perkembangan ke dalam Kartu Kembang Anak (KKA).
Kartu Kembang Anak (KKA) dapat berfungsi ganda yaitu sebagai alat penanda dan sekaligus sebagai alat komunikasi dalam membahas perkembangan anak, dari dan untuk ibu dan keluarga dalam masyarakat. Namun yang paling utama adalah untuk memfasilitasi

interaksi antara ibu (beserta keluarga seluruhnya) dengan anak (Soetjiningsih, 1995). Kartu tersebut dapat dipergunakan dalam setiap kesempatan interaksi ibu dan anak. Juga dalam keluarga dan pertemuan ibu-ibu, sebagai wahana belajar bersama. Sehingga penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) di kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) bersama di Posyandu, dan dapat untuk memantau tumbuh kembang anak.

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kegiatan pelayanan yang dilakukan satu hari dalam sebulan. Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka jumlah kader setiap BKB minimal 10 orang yang dibagi dalam 5 kelompok umur. Setiap kelompok umur dibina kader inti yang memberikan penyuluhan, kader piket yang mengasuh anak balita dan kader bantu yang membantu dan dapat menggantikan tugas kader inti atau kader piket demi kelancaran tugas (BKKBN,2007).

f. Manfaat atau Hasil dari Program Bina Keluarga Balita (BKB)

Program Bina Keluarga Balita (BKB) selain bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga dalam membina tumbuh kembang anak yang berusia balita, juga mempunyai manfaat penting yang dapat diperoleh Ibu adalah:

- 1) Dapat mengurus dan merawat anak balita serta pandai membagi waktu dan mengasuh anak;
- 2) Dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar;
- 3) Untuk meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak balita;
- 4) Supaya lebih terarah dalam cara pembinaan anak;
- 5) Agar mampu mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak sehingga tercipta ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak; dan
- 6) Agar mampu membentuk anak yang berkualitas.

Sedangkan manfaat yang akan diperoleh anak-anak dalam program bina keluarga balita, adalah sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Berkepribadian Luhur;
- 3) Tumbuh dan Berkembang secara optimal;
- 4) Cerdas, terampil, dan sehat;
- 5) Memiliki dasar kepribadian yang kuat guna perkembangan selanjutnya.

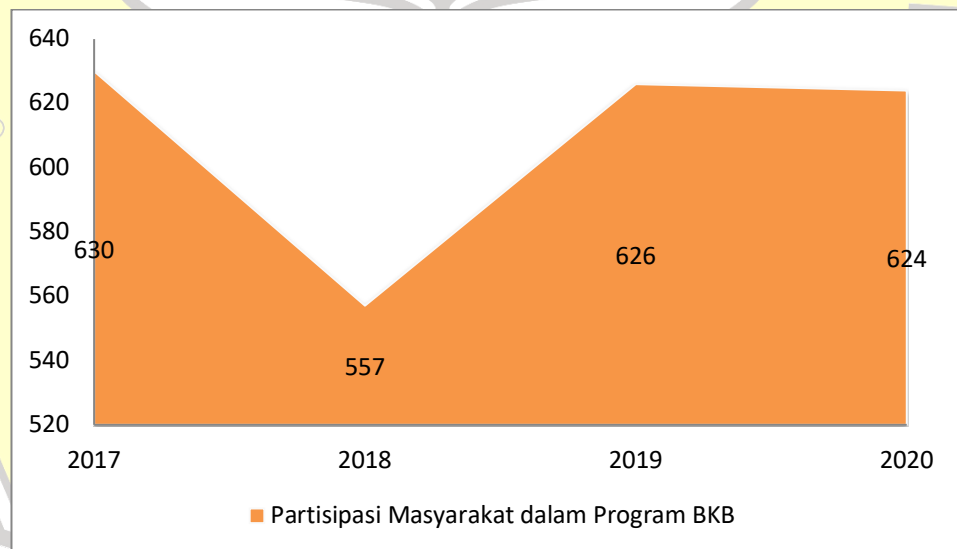
D. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.

1) Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja

Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) di UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan segala perencanaan kegiatan sebelumnya. Pelaksanaan program ini merujuk pada siklus hidup manusia, periode anak usia 0-5 tahun merupakan periode paling kritis dalam menentukan kualitas hidupnya di masa yang akan datang. Pengajaran dan pendidikan yang diberikan pada awal kehidupan ini menjadi modal dasar bagi kesuksesan dan kebahagiaan di masa dewasanya. Mendidik anak di masa sekarang dengan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat membutuhkan keterampilan mengasuh yang memadai dan konsep diri yang positif agar mampu berkomunikasi dan menerapkan disiplin dengan kasih sayang. Menurut Puspitawati (2012:23) Keluarga memang dalam hal ini merupakan wadah lingkungan universal yang utama dan pertama bagi setiap individu untuk belajar makan, berjalan, dan mengenal identitas dan berbagi

perilaku.

Oleh karena itu, kemampuan orangtua dalam memenuhi kebutuhan akan asah, asih dan asuh melalui komunikasi yang baik dan benar, akan mempengaruhi manusia dewasa di kemudian hari. Menyadari akan pentingnya pembinaan tumbuh kembang anak sejak dini, sejak tahun 1984 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencanangkan Program Bina Keluarga Balita (BKB), dan sejak 1991 Program ini berkembang menjadi gerakan BKB. Penyelenggaraan BKB merupakan upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam membina tumbuh kembang anak secara utuh dan optimal, melalui pemberian stimulasi fisik, kognitif, sosioemosional dan spiritual. Dengan aktif mengikuti kegiatan BKB, diharapkan orangtua memiliki bekal yang cukup untuk membantu anak-anaknya menjalani masa balitanya dengan benar, baik dan menyenangkan (DITBALNAK –BKKB 2015).



Sumber: UPTD Dalduk Wilayah Darmaraja, 2020

Gambar 2.1
Diagram Partisipasi Masyarakat dalam Program BKB UPTD Dalduk
Wilayah Darmaraja

Analisis mengenai partisipasi keluarga atau masyarakat dalam membantu program pengasuhan dan tumbuh kembang anak sudah banyak dilakukan, tetapi penelitian mengenai yang menggunakan data dalam jumlah besar (data nasional) belum banyak dilakukan. Berdasarkan analisis melalui diagram partisipasi masyarakat dalam mengikuti program Bina Keluarga Balita (BKB) UPTD Dalduk Wilayah Darmaraja sempat mengalami penurunan yang lumayan berpengaruh pada Tahun 2018, dan mengalami peningkatan kembali di Tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah yang memang masih terbilang tidak jauh dari sebelumnya, hanya saja tetap harus adanya peningkatan angkat tingkat partisipasi untuk mencapai sekurang-kurangnya 70-85% dari target yang ditentukan dalam partisipasi program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Dalduk Wilayah Darmaraja.

Analisis ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana partisipasi keluarga atau masyarakat dalam program pengasuhan anak dan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun pada anggota Bina Keluarga Balita (BKB). Secara khusus tujuan analisis ini adalah; 1) mengetahui perbedaan partisipasi keluarga dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun pada keluarga yang ikut BKB dengan yang tidak ikut BKB di wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang ini, 2) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjadi hambatan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak usia 0-5 tahun.

2) Faktor-faktor penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja

Dalam melaksanakan program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja ini ternyata terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat tingkat partisipasi masyarakat ikut dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) ini sesuai dengan pendapat Slamet (1994: 97), adalah sebagai berikut:

1. **Faktor Internal**
Faktor Internal disini adalah faktor yang berkaitan dengan dalam diri manusia atau seseorang itu sendiri, seperti halnya:
 2. **Pengetahuan dan Keahlian**, dimana pengetahuan dan keahlian dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki seseorang yang sudah ada sejak lahir atau memang sudah ada karena dilatih.
 3. **Pekerjaan Masyarakat**, adalah sesuatu faktor internal yang tidak bisa dihindari dari masyarakat karena sebagai alat untuk mempertahankan hidup masyarakat itu sendiri.
 4. **Pendidikan Masyarakat**, sering kali menjadi tolak ukur bagaimana masyarakat itu menjalani dan memberikan sesuatu kepada oranglain dalam hidupnya, pendidikan sering kali menjadi faktor pengubah hidup seseorang.
 5. **Jenis Kelamin**, suatu identitas yang dimiliki seseorang dalam menjalani kehidupan karena seringkali semua hal termasuk pekerjaan itu biasanya bertolak ukur pada jenis kelamin.
 6. **Usia** yang dimiliki, menjadi salah satu faktor apakah seseorang dapat mengerjakan atau melakukan sesuatu dengan jangka waktu yang ditentukan.
 7. **Kepercayaan terhadap budaya tertentu**, biasanya mempengaruhi cara berpikir seseorang termasuk dalam kegiatan bermasyarakat.
Faktor internal sering kali menjadi hambatan paling signifikan, karena hal ini lahir dan ada pada diri seseorang.
8. **Faktor Eksternal**
Faktor Eksternal pada dasarnya faktor yang berkaitan dengan pihak luar atau hal-hal yang berhubungan dengan orang banyak. Seperti halnya:
 - a. **Hubungan stakeholder** antara satu orang dengan lainnya, stakeholder mempengaruhi sifat manusia terutama dalam hal ikut berpartisipasi.
 - b. **Kemudia pihak-pihak yang mempunyai pengaruh tertentu** pun menghambat atau mempengaruhi pihak lainnya yang tidak mempunyai kunci dalam sarana partisipasi.

Sedangkan menurut Angell yang dikutip Saca Firmansyah (2009: 26) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia, merupakan waktu yang terlewat sejak kelahiran pada manusia.
2. Jenis Kelamin, merupakan perbedaan biologis antara pria dan wanita yang dimiliki manusia.
3. Pendidikan, merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan atau penelitian
4. Pekerjaan dan Penghasilan, pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau masyarakat, dan mereka akan mendapatkan hasil/gaji dari pekerjaannya sesuai yang ditentukan maka itu disebut penghasilan.
5. Lamanya Tinggal, merupakan suatu waktu dimana seseorang telah menempati suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10) ada 4 poin yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

1. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, adalah komunikasi yang dilakukan secara pribadi dan berkesinambungan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
2. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, iklim ini sangat mempengaruhi proses kehidupan masyarakat dalam melakukan segala sesuatu yang menjadi tolak ukur kehidupan manusia.
3. Kesempatan untuk berpartisipasi, adalah hal yang diberikan kepada semua orang untuk mencapai tujuan yang ditargetkan, dan
4. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi, adalah hal yang diberikan kepada semua orang juga untuk memperlihatkan bagaimana setiap orang dapat berbeda dengan yang lainnya.

Dengan mengenali faktor-faktor tersebut baik yang ada di dalam maupun di luar UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja, maka diharapkan

tingkat partisipasi masyarakat tetap ada tinggi dalam program Bina Keluarga Balita (BKB).

3) Upaya-Upaya dalam Mengatasi Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja

Menurut Dwiyanto (2002: 23) hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program kegiatan pemerintahan terutama untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat, harus bisa dan ada upaya dalam mengatasi hal-hal hambatan tersebut, dengan begitu yang perlu dilakukan pemerintah adalah dengan beberapa tahapan tersebut:

1. **Formulasi**
Formulasi ini dimaksudkan kepada beberapa identifikasi mengenai kejelasan dan keutuhan program atau kegiatan, dan mengidentifikasi siapa saja pengguna jasa dalam kegiatan (masyarakat).
2. **Promosi**
Promosi ini diharapkan menjadi salah satu cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut dalam suatu kegiatan tertentu. Promosi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi secara langsung atau melalui media tertentu.
3. **Perbaikan Pelayanan**
Perbaikan pelayanan pada setiap kegiatan itu perlu, sehingga pengguna jasa dapat lebih pro aktif kedepannya dan mampu untuk ikut berpartisipasi ke arah selanjutnya.
4. **Monitoring**
Monitoring ini diharapkan menjadi alat sebagai penyampaian pelayanan program kepada masyarakat, agar masyarakat tahu penting atau tidaknya suatu kegiatan.
5. **Evaluasi**
Evaluasi ini dapat dilakukan untuk mengetahui kondisi lapangan dan dapat meninjau hal-hal kemungkinan terjadi secara berulang. Evaluasi dapat dilakukan melalui penyebaran kusioner pada masyarakat.

Menurut Sudriamunawar (2006: 58) agar kegiatan partisipasi masyarakat berjalan dengan efektif dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:

1. Melalui Aspek Kelembagaan, yang merupakan sebuah komponen yang penting dalam suatu wilayah, di samping itu mempunyai fungsi ataupun peranan sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah/stakeholder terkait.
2. Melalui Aspek Program, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan target yang ditentukan.

Sedangkan menurut Sumampouw (2004: 106-107), ada beberapa prinsip partisipasi yang dapat dijadikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Cakupan, yang merupakan sesuatu yang mencakup atau sesuatu yang dapat dijangkau.
2. Kesetaraan dan Kemitraan, yang merupakan tata sosial dimana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama.
3. Transparansi, merupakan keterbukaan dan pertanggungjawaban setiap hal yang dilakukan atau dikeluarkan.
4. Kesetaraan Kewenangan, sebagai sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang dalam konteks kewenangan tertentu.
5. Kesetaraan Tanggungjawab, dapat dikatakan setiap orang yang saling berkaitan dalam suatu tempat atau organisasi mempunyai tanggungjawab yang sama satu sama lain.
6. Pemberdayaan, adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan kelompok lemah masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
7. Kerjasama, suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

Hal-hal tersebut di atas diharapkan dapat membantu dalam mengatasi berbagai hambatan dalam peningkatan partisipasi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang relevan dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang posisi dan kelayakan penelitian tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja. Selain itu kajian penelitian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinilitas dari penelitian. Berikut ini disajikan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan terhadap penelitian ini antara lain:

1. Penelitian oleh Saudari Ramlawati (2013) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Hasanudin, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Progran Bina Keluarga Balita (BKB) Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo”, menyimpulkan dari hasil analisis variabel terbilang cukup karena dengan dibuktikan bahwa pelaksanaan program Bina Keluarga Balita di Kelurahan Balandai selalu dilaksanakan hanya saja perlu dilakukannya tindakan yang lebih lanjut yang progresif sehingga program-program yang hendak dicapai bisa tercapai dengan sangat baik, harus adanya peningkatan kualitas dari para kader dan petugas BKB, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatkan program akademik untuk membantu terlaksananya program dan perlu adanya penguatan kebijakan.
2. Penelitian oleh saudari Deasy Hanura Estuti (2014) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang, dengan judul skripsi “Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Posyandu Berbasis Masyarakat terhadap Pertumbuhna Balita

di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung”, menyimpulkan dari hasil analisis variabel bahwa Partisipasi masyarakat peserta posyandu di Desa Mergowati sudah baik terbukti dengan banyaknya ibu balita yang hadir dalam kegiatan posyandu, Layanan posyandu di Desa Mergowati sudah baik dengan srata posyandu mandiri. Tingkat keberhasilan posyandu di Desa Mergowati sudah dapat dikatakan baik terbukti dengan tidak ditemukan adanya anak yang mengalami timbangan rendah dan timbangan dibawah garis merah (BGM).

3. Penelitian oleh Irma Wijaya Putri, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Sebelas April Sumedang (2019) “Partisipasi Masyarakat di sekitar Hutan dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada Perhutani Kabupaten Sumedang, menyimpulkan dari hasil analisis variabel menunjukan bahwa partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) pada Dinas Perhutani Kabupaten Sumedang adalah keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan sangatkah aktif, memberikan data dan informasi aktif, ikut serta dalam proses pembuat keputusan, memberikan dukungan sangat besar dan aktif, bertanggungjawab sekali dalam pengelolaan program.

Untuk lebih jelasnya mengenai persamaan, perbedaan dan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka dapat peneliti sajikan dalam tabel penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Identitas dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Saudari Ramlawati, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Hasanudin (2013) “Pelaksanaan Progran Bina Keluarga Balita (BKB) Di Kelurahan Balandai Kecamatan Bara Kota Palopo”	Pola Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB) .	Penelitian saat ini memfokuskan kepada partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB), Faktor penghambat dan upaya mengatasi hambatan yang ada, serta objek yang berbeda dengan penelitian terdahulu, yakni penelitian saat ini mengambil objek penelitian pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bina Keluarga Balita di Kelurahan Balandai selalu dilaksanakan hanya saja perlu dilakukannya tindakan yang lebih lanjut yang progresif sehingga program-program yang hendak dicapai bisa tercapai dengan sangat baik, harus adanya peningkatan kualitas dari para kader dan petugas BKB, perbaikan sarana dan prasarana, meningkatkan program akademik untuk membantu terlaksananya program dan perlu adanya penguatan kebijakan.
2	Deasy Hanura Estuti, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang (2014) “Partisipasi	Penelitian terdahulu memiliki variabel penelitian yang sama mengenai Partisipasi Masyarakat.	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan partipasi masyarakat dalam Layanan Posyandu yang berbasis masyarakat. Berbeda dengan penelitian saat ini yang bertujuan menganalisis	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat peserta posyandu di Desa Mergowati sudah baik terbukti

No	Identitas dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Masyarakat dalam Layanan Posyandu Berbasis Masyarakat terhadap Pertumbuhan Balita di Desa Mergowati Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung”		partisipasi masyarakat dalam program bina keluarga balita pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.	dengan banyaknya ibu balita yang hadir dalam kegiatan posyandu, Layanan posyandu di Desa Mergowati sudah baik dengan rata posyandu mandiri. Tingkat keberhasilan posyandu di Desa Mergowati sudah dapat dikatakan baik terbukti dengan tidak ditemukan adanya anak yang mengalami timbangan rendah dan timbangan dibawah garis merah (BGM).
3	Irma Wijaya Putri, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Sebelas April Sumedang (2019) “Partisipasi Masyarakat di sekitar Hutan dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada Perhutani Kabupaten Sumedang.	Penelitian terdahulu memiliki variabel penelitian yang sama mengenai Partisipasi Masyarakat.	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan partisipasi masyarakat dalam dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Berbeda dengan penelitian saat ini yang bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam program bina keluarga balita pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di sekitar hutan dalam program pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat (PHBM) pada Dinas Perhutani Kabupaten Sumedang adalah keikutsertaan masyarakat dalam menghadiri rapat perencanaan sangatlah aktif, memberikan data dan informasi aktif,

No	Identitas dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
				ikut serta dalam proses pembuatan keputusan, memberikan dukungan sangat besar dan aktif, bertanggungjawab sekali dalam pengelolaan program.

Berdasarkan penjelasan kajian penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara kajian penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini, dengan adanya penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya serta penelitian terdahulu di atas dapat membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Persamaan yang diperoleh dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama menjelaskan mengenai Partisipasi masyarakat yang terjadi dalam suatu organisasi tertentu, dimana persamaan ini dapat digunakan sebagai acuan dari penelitian sebelumnya. Perbedaan yang diperoleh dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah objek yang diteliti dan variabel yang lebih mengacu kepada hal yang sama sekali tidak sama dengan penelitian terdahulu.

F. Kerangka Pemikiran dan Instrumen Penelitian

1) Kerangka Pemikiran

Landasan berpikir dalam melakukan kegiatan penelitian ini adalah peneliti mengambil teori-teori yang berkaitan dengan judul yang diungkapkan, yaitu teori Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita. Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan arah dan tujuan dari penelitian ini. Partisipasi merupakan pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Program Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader, Program Bina Keluarga Balita (BKB) ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecederasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu atau anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Bina Keluarga Balita menurut Pedoman Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Tahun 2006, adalah sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, kegiatan ini dilaksanakan oleh sejumlah kader yang berada

ditingkat RW. Dalam melaksanakan kegiatan ini tentunya membutuhkan semua pihak untuk berpartisipasi dalam keberhasilan program, khususnya masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar sinergitas antar pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu.

Ada beberapa jenis partisipasi masyarakat seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil dan partisipasi dalam evaluasi (Riwu Kaho, 2017:127). Jadi, dengan adanya partisipasi masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) dengan mendasarkan pada dimensi-dimensi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam pencapaian partisipasi masyarakat dalam suatu program yang sesuai dengan tujuan organisasi atau meningkatkan mutu organisasi dari partisipasi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu partisipasi yang berkaitan tentang pemberian gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Ada tiga jenis keputusan: seperti Keputusan Awal, Keputusan yang sedang berlangsung dan Keputusan Operasional, dimana ketiga keputusan itu berkaitan dengan rancangan, perumusan atau prosedur yang harus dilaksanakan dalam

program Bina Keluarga Balita di Wilayah Darmaraja yang akan menyangkut pada tingkat Partisipasi Masyarakat yang lebih baik. Target dan capaian yang diperoleh Wilayah Darmaraja terkait seberapa tinggi partisipasi masyarakat adalah mengacu pada hal-hal tersebut.

Partisipasi dalam pelaksanaan, adalah masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek implementasi dalam tiga cara utama yaitu kontribusi sumber daya, upaya administrasi dan koordinasi dan program kepesertaan. Masyarakat Wilayah Darmaraja harus mampu memberikan kontribusi sumberdaya maupun koordinasi secara signifikan dalam meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB).

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dapat dilihat dari tiga macam manfaat yaitu materi, sosial dan pribadi. Manfaat material pada dasarnya adalah barang pribadi dari masyarakat Wilayah Darmaraja yang menghasilkan dari suatu proyek. Manfaat sosial pada dasarnya adalah barang publik. Manfaat ini biasanya dicirikan sebagai layanan atau fasilitas seperti sekolah, klinik kesehatan dan jalan yang baik. Manfaat pribadi bukan berarti manfaat secara individu, keuntungan pribadi dalam hal ini seperti kepada anggota kelompok atau sektor karena ini memperoleh kekuatan sosial dan politik yang lebih banyak melalui pengoperasian proyek.

Partisipasi dalam evaluasi, yaitu mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya dengan melihat kontribusi masyarakat darmaraja dalam pelaksanaan program. Tahap ini sebagai umpan balik untuk perbaikan pelaksanaan program di UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.

Terdapat dua tipe partisipasi dalam evaluasi program yaitu dengan partisipasi langsung (masyarakat darmaraja terjun langsung sebagai keluarga Balita dalam program atau membantu menjadi pelaksana Program BKB) dan Partisipasi tidak langsung (Masyarakat hanya memberikan partisipasi dengan tidak langsung).

Dengan demikian, Partisipasi Masyarakat dapat ditingkatkan dengan baik dan berkesinambungan dalam pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita(BKB) di Wilayah Darmaraja dengan menyesuaikan beberapa hal yang menjadi dasar atau upaya peningkatan Partisipasi Masyarakat. Dengan adanya hal-hal yang mendasari tingkatan partisipasi, setidaknya target dan capaian tersebut dapat diperoleh dengan hasil yang cukup memuaskan sesuai dengan target yang diinginkan UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja dalam pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita (BKB).

Hambatan Partisipasi masyarakat Wilayah Darmaraja dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) terdiri dari Faktor Internal seperti: Masih rendahnya Kualitas Pendidikan dan Pengetahuan Masyarakat darmaraja yang mengikuti program sehingga masih banyak masyarakat yang menganggap tidak terlalu penting, Pekerjaan Masyarakat yang menjadi hambatan selanjutnya karena masih banyak masyarakat yang lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan dengan mengikuti atau berpartisipasi dalam program, selanjutnya Masih ada Masyarakat darmaraja yang mempunyai buta huruf sehingga menyebabkan kurang aktifnya masyarakat dalam berkontribusi atau mengajukan keluhan terkait program, perbedaan jenis kelamin menjadi salah satu hambatan yang umum karena mayoritas masyarakat yang berpartisipasi adalah perempuan, kemudian usia

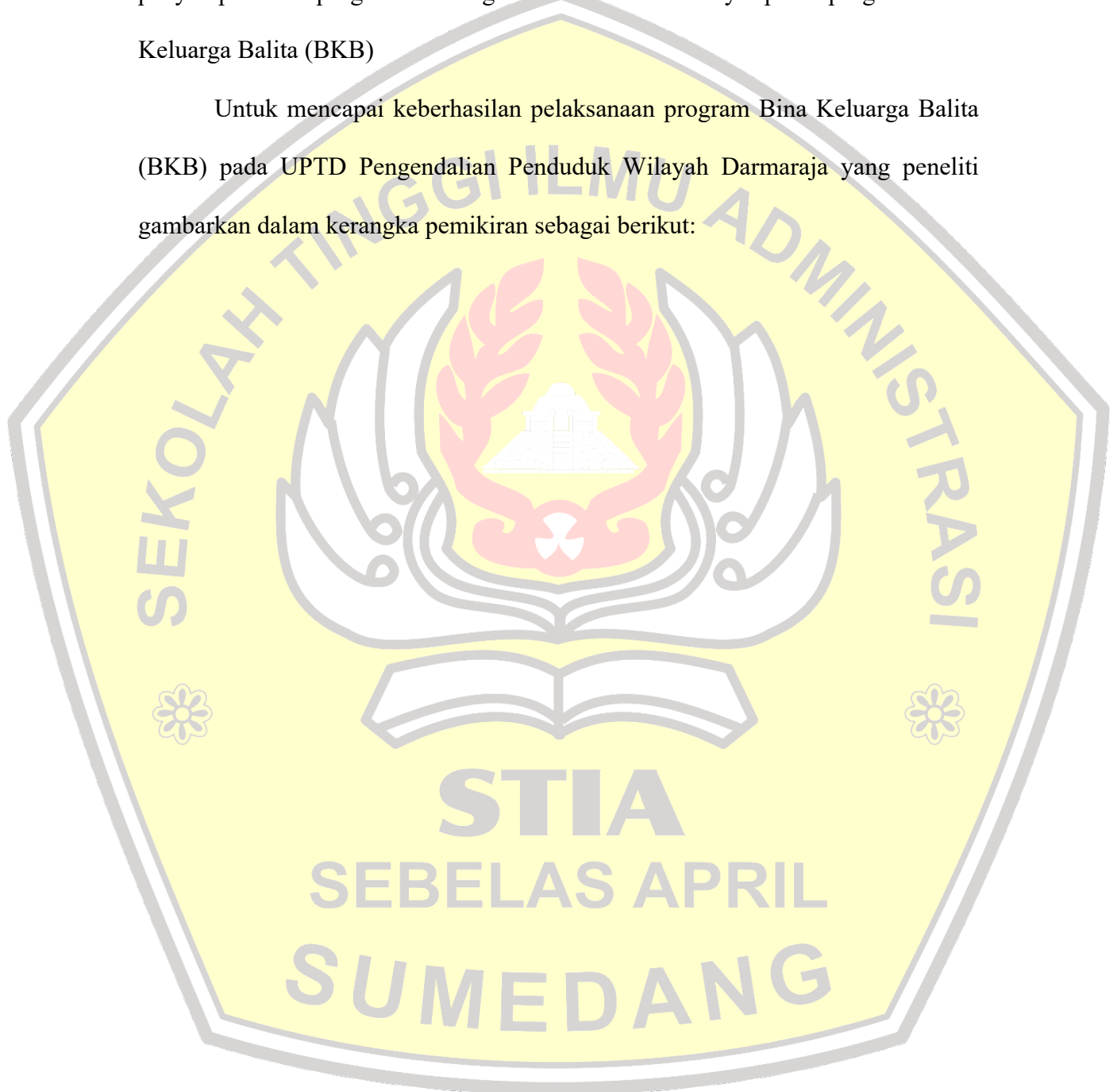
menjadi hambatan paling signifikan juga karena masih rendahnya usia-usia muda yang berpartisipasi yang masih menganggap bahwa yang harus mengikuti adalah usia 30 tahun ke atas, selanjutnya ada kepercayaan terhadap budaya tertentu menyebabkan pola pikir masyarakat menjadi pendek terhadap pentingnya program untuk balita di wilayah darmaraja.

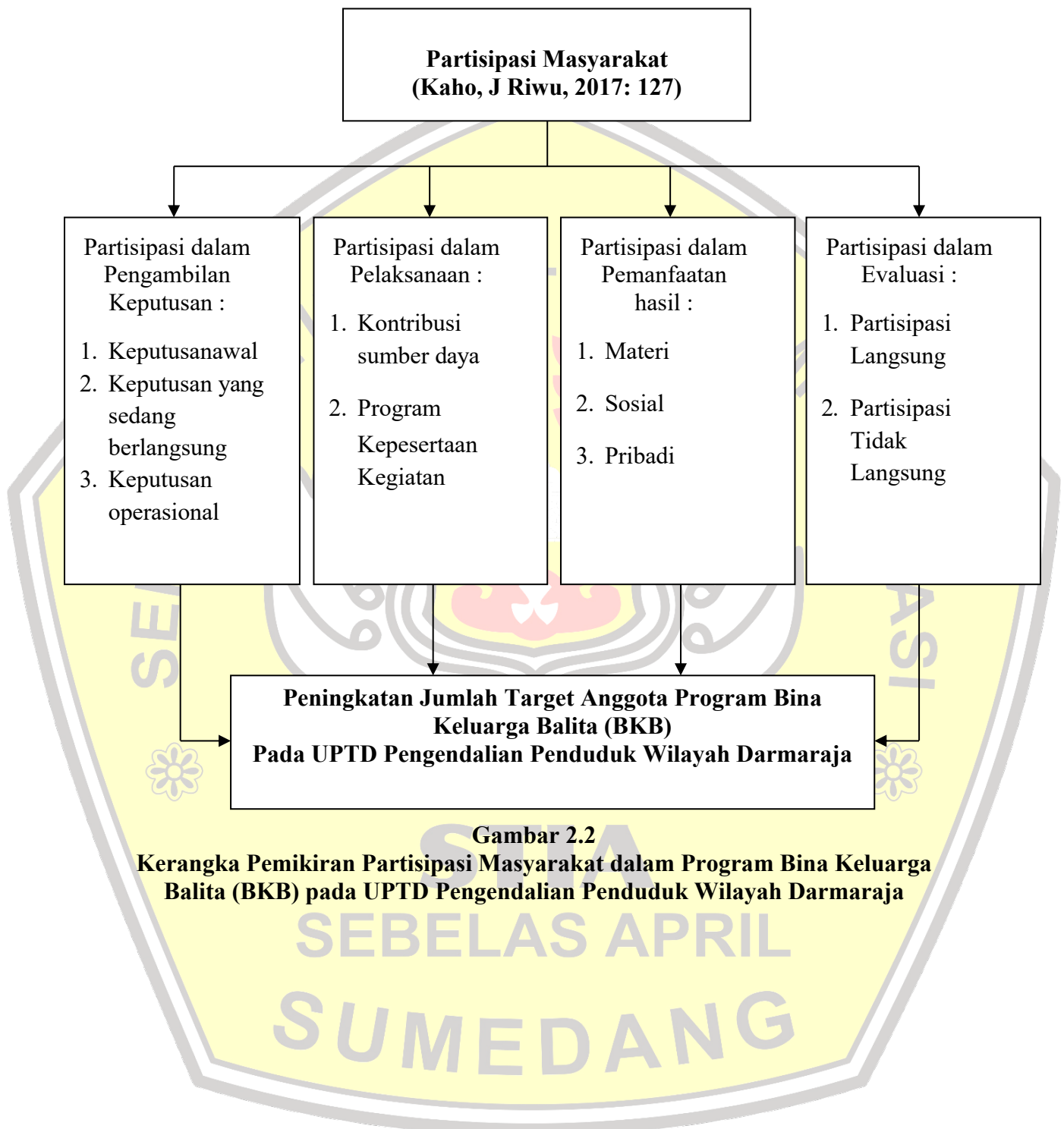
Upaya yang harus dilakukan terkait peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan pelaksanaan Pembangunan khususnya Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja adalah dengan memperbaiki system formulasi program dimana identifikais target dan perbaikan standard pelayanan harus benar-benar sesuai, dilakukannya promosi oleh Pihak Pelaksana BKB terkait kegiatan sosialisasi program secara menyeluruh di wilayah darmaraja, Pihak UPTD dapat cepat tanggap dalam Klarifikasi pelaksanaan yang dikeluhkan masyarakat, dilakukan monitoring secara berkala di wilayah darmaraja dengan bertujuan adanya penyampaian hasil layanan program, kemudian bisa dilakukan evaluasi kegiatan seperti penyebaran kusioner untuk melihat kondisi lapangan baik kepada pihak-pihak yang ikut andil dalam program atau kepada keluarga dan masyarakat Darmaraja.

Dengan adanya Upaya tersebut capaian partisipasi masyarakat dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan pemerintah dan ditetapkan berdasarkan keputusan dan rancangan prosedur yang telah ditentukan sebelumnya. Program ini menjadi program unggulan yang meningkatkan tumbuh kembang balita dalam memprioritaskan kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan yang dimilikinya. Program ini bisa benar-benar menjadi program

yang tepat sasaran dan tepat target sesuai dengan yang ditargetkan oleh BKKBN guna keberhasilan perbaikan pertumbuhan penduduk berdasarkan pada penyempurnaan program keluarga berencana khususnya pada program Bina Keluarga Balita (BKB)

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja yang peneliti gambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:





2) Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas, peneliti merumuskan instrumen penelitian dengan mengacu kepada fokus permasalahan yang dituangkan dalam bentuk kisi-kisi instrumen penelitian:

Tabel 2.2
Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Indikator	No. Item
Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) Menurut Riwu Kaho (2017: 127)	1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan	a. Keputusan awal	1
		b. Keputusan yang sedang berlangsung	2
		c. Keputusan operasional	3
	2. Partisipasi dalam Pelaksanaan	a. Kontribusi sumber daya	4
		b. Program kepesertaan kegiatan	5
	3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil	a. Materi	6
		b. Sosial	7
		c. Pribadi	8
	4. Partisipasi dalam Evaluasi	a. Partisipasi langsung	9
		b. Partisipasi tidak langsung	10
Faktor –faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat menurut Slamet (1994: 97)	1. Faktor Internal	a. Pengetahuan dan Keahlian	11,12
		b. Pekerjaan Masyarakat	13
		c. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf	14
		d. Jenis Kelamin	15
		e. Usia yang dimiliki	16
		f. Kepercayaan	

Fokus Permasalahan	Fokus Teori	Indikator	No. Item
		terhadap Budaya Tertentu	17
	2. Faktor Eksternal	a. Hubungan Stakeholder b. Pihak yang berpengaruh	18 19
Upaya-Upaya Mengatasi Hambatan Partisipasi Masyarakat menurut Dwiyanto (2002: 23)	1. Formulasi	a. Identifikasi pengguna jasa b. Pembentukan standar kualitas pelayanan	20 21
	2. Promosi	a. Kegiatan Sosialisasi Program	22
	3. Perbaikan Pelayanan	a. Cepat Tanggap dan klarifikasi keluhan	23
	4. Monitoring	a. Adanya penyampaian hasil layanan program	24
	5. Evaluasi	a. Penyebaran Kusioner untuk melihat kondisi lapangan.	25

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan yang diharapkan perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai dan tepat. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data.

Menurut (Sugiyono, 2012: 21) “Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan/menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas”. Metode ini merupakan suatu metode untuk menjelaskan Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang dengan lebih banyak dituangkan kedalam bentuk tertulis dan data dokumentasi.

Kecenderungan untuk menggunakan metode penelitian ini, didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini dianggap sangat relevan dengan materi yang peneliti buat.

Menurut (Sugiyono, 2012: 1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif

lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Bodgan dan Taylor (Moleong, 2007: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati”. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu tersebut secara *holistic* (utuh). Sedangkan menurut Denzin dan Lincoln (Moleong, 2007: 5) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan metode yang ada”.

Instrumen penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2012: 61) adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan.

Indikasi (*fenomena masalah*)

1. Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam menunjang keberhasilan program Bina Keluarga Balita (BKB), hal ini dapat dilihat dari tidak adanya bantuan moril dan material dari masyarakat.
2. Masih rendahnya tingkat minat para orangtua sebagai keluarga yang memiliki balita untuk mengikuti program Bina Keluarga Balita (BKB), Hal ini dibuktikan anak-anak mereka hanya belajar dan bermain di rumah saja, tidak ikut mendaftar meskipun sudah diberikan arahan, karena mereka masih menganggap tidak terlalu penting dan mereka berpikir dengan mengembangkan pola asuh di rumah saja sudah sangat cukup.
3. Kurangnya kesadaran orangtua terhadap permasalahan tumbuh kembang balita. Hal ini dibuktikan masih banyaknya balita yang terlambat berjalan, terlambat bicara, carebral palsy, autisme, sindrom down. Permasalahan-permasalahan tumbuh kembang balita tersebut tidak hanya dikarenakan keturunan tetapi biasanya dari kekurangan nutrisi yang diberikan, kurangnya perhatian dan kurangnya pengetahuan dari orangtua.
4. Masih rendahnya kualitas kader pos kesehatan Bina Keluarga Balita, hal ini dapat dilihat dari pendidikan rendah yang dimiliki para kader dan minimnya pengalaman para kader, usia yang dimiliki para kader mayoritas 40 tahun ke atas.

Fokus Permasalahan

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja?
2. Faktor-Faktor apa saja yang menjadi penghambat pada Partisipasi Masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja?
3. Upaya-Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja?

Ada beberapa jenis partisipasi yang dapat memberikan kontribusi keberhasilan program kegiatan, Pendapat Riwu Kaho (2017: 127), adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan
3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil
4. Partisipasi dalam Evaluasi

Faktor-faktor penghambat (Slamet, 1994: 97) :

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal

Upaya-Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan partisipasi (Dwiyanto, 2002: 23), antara lain sebagai berikut:

1. Formulasi
2. Promosi
3. Perbaikan Pelayanan
4. Monitoring
5. Evaluasi



Gambar 3.1
Desain Penelitian

B. Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian

1. Penentuan Sasaran Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, setiap kegiatan pengumpulan data selalu berhadapan dengan objek yang diteliti, baik berupa manusia, benda maupun aktivitas-aktivitas atau kejadian-kejadian dimana suatu masalah dapat untuk keseluruhan karakteristik objek, penelitian ini disebut objek penelitian.

Sementara itu dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun oleh Spradey (dalam Sugiyono, 2012: 215) dinamakan "*Social Situation*" atau situasi sosial yang terdiri dari atas tiga elemen, yaitu: tempat (*Place*), perilaku (*Actors*), dan aktivitas (*Activity*) yang berinteraksi secara sinergitas. Objek dan informasi penelitian kualitatif menjelaskan objek penelitian yang menjadi fokus dan lokus penelitian ini adalah Pegawai UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja Kabupaten Sumedang dan beberapa kader dan masyarakat tertentu.

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Penelitian

No.	Sasaran Penelitian	Jumlah (Orang)
1	Kepala UPTD	1
2	Kasubag TU	1
3	PKB/PLKB	3
4	TPD	8
Jumlah		13

Sumber : Data Kepegawaian UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja

2. Informan Penelitian

Dalam rangka memperoleh informasi yang akurat serta data diperoleh dari informan serta sampel. Informan adalah pegawai yang benar-benar memahami permasalahan dengan argument bahwa mereka mengetahui banyak mengenai fenomena yang terjadi di lapangan sedangkan sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive*, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012: 219). Artinya yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah mereka-mereka yang ada hubungannya dengan partisipasi masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB).

Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan :

- a. Otoritas yang dimiliki oleh informan terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.
- b. Dianggap memiliki informasi yang banyak mengenai partisipasi masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.
- c. Memiliki keterkaitan, baik secara individu maupun instuisi dengan partisipasi masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.

Adapun yang ditentukan menjadi informan dalam penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi serta terlibat dalam partisipasi masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja. Maka yang dijadikan informan adalah:

Tabel 3.2
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja	1 Orang
2.	PKB/PLKB dan TPD yang berkaitan dengan BKB	1 Orang
3.	Ketua Kelompok BKB	1 Orang
4.	Masyarakat	2 Orang
Jumlah		5 Orang

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti menggunakan teknik *triangulation* (triangulasi) sebagai salah satu bentuk pengumpulan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan
2. Studi lapangan

- a. Observasi
- b. Wawancara mendalam
- c. Dokumentasi

Adapun penjelasan akan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dengan menggunakan referensi dari buku, jurnal, makalah dan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sebagai penunjang penelitian.

2. Studi lapangan

a. Observasi

Menurut Sukardi (2003: 78), observasi atau yang disebut pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dan lebih banyak menggunakan salah satu dari pancaindra yaitu indra penglihatan.

Observasi akan lebih efektif jika informasi yang hendak diambil berupa kondisi atau fakta alami, tingkah laku dan hasil kerja responden dalam situasi alami. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian dengan tujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.

b. Wawancara mendalam

Sugiyono (2012: 231) Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self – report* atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Pihak yang menjadi narasumber antara lain yaitu Kepala UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja, Tenaga Penggerak Desa yang berkaitan dengan BKB, Para Kader perwakilan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut dijadikan sebagai data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan melalui wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Sukardi (2003: 81) Pada teknik ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden atau tempat. Pengumpulan data berupa data-data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja.

D. Teknik Pengolahan Data

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu pada operasi dasar yang menghasilkan keluaran penting yang mengutip dari Model Miles and Huberman (1984) yang diterjemahkan oleh Sugiyono yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

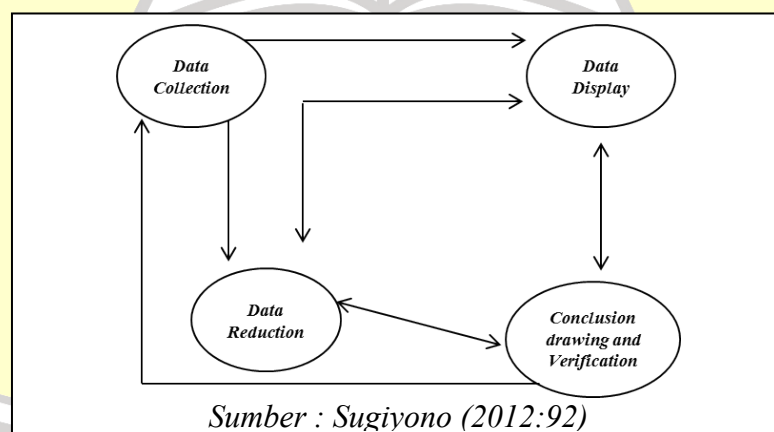
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif hipotesis atau teori.



Gambar 3.2
Komponen dalam Analisis Data

E. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi Penelitian partisipasi masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) dilaksanakan pada UPTD Pengendalian Penduduk Wilayah Darmaraja. Waktu Penelitian ini dilakukan mulai Januari 2021 sampai dengan Maret 2021.



Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Januari 2021				Februari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021				Juni 2021				Juli 2021				Agustus 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan a. Studi Kepustakaan b. Pengajuan Judul c. Perizinan d. Observasi Awal																																
2	Pengumpulan Data																																
3	Pembuatan Bab I, Bab II dan Bab III																																
4	Seminar Proposal																																
5	Penyusunan Bab IV dan Bab V																																
6	Sidang Skripsi																																

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian dan Penduduk Wilayah Darmaraja, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian dan Penduduk Wilayah Darmaraja cukup baik, Partisipasi karena dilihat dari rutin nya menghadiri kegiatan bulanan bina keluarga balita yang pada pelaksanaannya kegiatan bulanan tersebut termasuk pada kegiatan penyuluhan dan penimbangan balita, selain itu orang tua anggota kegiatan BKB memiliki kemauan untuk bertanya mengenai informasi kegiatan BKB yang akan dilakukan kepada kader BKB ataupun saling memberikan informasi kepada sesama anggota BKB lainnya. Stimulasi tumbuh kembang balita yang dilakukan oleh orang tua yang berpartisipasi pada kegiatan BKB dapat dikatakan baik karena stimulasi yang dilakukan oleh orang tua sudah memenuhi kebutuhan dasar anak asuh, asih, dan asah dilihat dari pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi pada balita oleh orang tua, kasih sayang yang diberikan oleh orang tua terhadap balita nya. Stimulasi tumbuh kembang balita dipengaruhi oleh partisipasi orang tua pada kegiatan bina keluarga balita (BKB).

2. Faktor-faktor penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian dan Penduduk Wilayah Darmaraja, diantaranya adalah:

- a. Masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam menunjang keberhasilan program Bina Keluarga Balita (BKB), hal ini dapat dilihat dari anak-anak mereka yang hanya belajar dan bermain di rumah saja, tidak ikut mendaftar meskipun sudah diberikan arahan, karena mereka masih menganggap tidak terlalu penting dan mereka berpikir dengan mengembangkan pola asuh di rumah saja sudah sangat cukup.
- b. Kurangnya kesadaran orangtua terhadap permasalahan tumbuh kembang balita. Hal ini dibuktikan masih banyaknya balita yang terlambat berjalan, terlambat bicara, carebral palsy, autisme, sindrom down. Permasalahan-permasalahan tumbuh kembang balita tersebut tidak hanya dikarenakan keturunan tetapi biasanya dari kekurangan nutrisi yang diberikan, kurangnya perhatian dan kurangnya pengetahuan dari orangtua.
- c. Masih rendahnya kualitas kader pos kesehatan Bina Keluarga Balita, hal ini dapat dilihat dari pendidikan rendah yang dimiliki para kader dan minimnya pengalaman para kader, usia yang dimiliki para kader mayoritas 40 tahun ke atas.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat Partisipasi Masyarakat dalam Program Bina Keluarga Balita (BKB) pada UPTD Pengendalian dan Penduduk Wilayah Darmaraja, adalah:

1. UPTD Pengendalian dan Penduduk Wilayah Darmaraja dapat mengidentifikasi pengguna jasa program dan kegiatan BKB, menetapkan sasaran masyarakat yang berpartisipasi dalam setiap kegiatan, baik dari Jenis Pekerjaan, Usia, Jenis kelamin dan Pekerjaan dapat ditentukan sesuai dengan prosedur partisipasi masyarakat dalam program BKB.
2. Meningkatkan pengetahuan melalui Sosialisasi dan Penyuluhan kepada Masyarakat sebagai alat promosi program dan perbaikan layanan program, untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan orangtua serta kader yang bertugas melaksanakan kegiatan.
3. Meningkatkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi program, sebagai bentuk peninjauan kegiatan yang dilaksanakan, dan untuk meningkatkan pelaksanaan program yang lebih kedepannya.

B. Saran

Pada bagian ini peneliti mencoba mengajukan beberapa saran kepada UPTD Pengendalian dan Penduduk Wilayah Darmaraja, sebagai sumbangan pikiran dari peneliti. Adapun saran yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini, peneliti menyarankan kepada para peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lainnya baik dengan judul penelitian yang sama, agar dapat menerapkan pendekatan penelitian dengan teori-teori yang lebih bervariasi, dan diharapkan dapat lebih menggali permasalahan lebih dalam lagi dan harus mampu melihatnya dari berbagai sisi. Dan saran untuk pengembangan ilmu, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat atau dengan variable-variabel lain di luar variabel yang diteliti.

2. Saran Praktis

- a. Untuk UPTD Pengendalian dan Penduduk Wilayah Damaraja, diharapkan dapat lebih meningkatkan sosialisasi dalam bentuk promosi program organisasi, yang bertujuan untuk menambah wawasan para petugas, Kader yang bekerja di lapangan, serta dapat meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat yang ikut berperan dalam program BKB baik dari pihak keluarga yang mengikuti untuk pertumbuhan anak-anaknya, atau untuk para calon kader yang ingin berperan membantu keberhasilan program.
- b. Dengan melihat pentingnya Program Bina Keluarga Balita bagi semua masyarakat, diharapkan UPTD Pengendalian dan Penduduk Wilayah Damaraja dapat menentukan cara yang lebih signifikan dan lebih terarah dalam proses meningkatkan partisipasi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Akadun, 2009. *Administrasi Perusahaan Negara*, Bandung: Alfabeta.

_____, 2009. *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Atmosudirjo, Prajudi, 1982. *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Ghalia

Indonesia

_____, 1990. *Dasar-dasar Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia

Indonesia.

Dimock,dkk, 2001. *Administration Negara*, Jakarta: Rineka Cipta

Dwiyanto, Agus, 2002. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*,

UGM: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.

Handayaniingrat, Soewarno. 1985. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan*

Manajemen, Jakarta: PT.Gunung Agung.

_____, 1996. *Azas-azas Organisasi dan Manajemen*, Jakarta:

PT.Gunung Agung.

_____, 2003. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*,

Jakarta: PT.Gunung Agung.

Handoko, T. Hani, 1990. *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE.

Hasibuan, Malayu S.P., 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT.

Bumi Aksara.

Holil, Soelaiman. 1980. *Partisipasi sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*.

Bandung: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial.

H.A.R., Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Igrisia, Irawaty. 2008. *Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik*. Makassar. Jurnal Administrasi Negara.

Iskandar. 2005. *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Putri.

Isbandi. 2007. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: SUN

Kaho, Josef Riwu. 2017. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Meleong, Lexy, J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Arni. 2014. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muluk, M.R. Khairul. 2007. *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia.

Murtie, Arifin. 2012. *Menciptakan Sumber Daya Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia

Napitupulu, Paimin dan Thamrin Mandiri. 2008. *Ekologi Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.

Ningrum, D. W. N., Berliana, D. S. ., Fauzi, I. ., Nurcahyati, S. ., & Wijaya, T. .
(2020). UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI PRIA
DALAM PROGRAM METODE OPERASI PRIA (MOP) DI
KABUPATEN SUMEDANG. *Journal Of Regional Public
Administration (JRPA)*, 5(2), 83-91. Retrieved from

<http://jurnal.ilmuadministrasisebelasapril.ac.id/index.php/jrpa/article/view/55>

Puspitawati, H. 2012. *Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia*.

Bogor : IPB Press.

Robbins, Stephen P. 1999. *Perilaku Organisasi: Konsep Kontropersi dan Aplikasi*.

Jakarta: Prenhallindo

Rohman, Ainur. 2009. *Partisipasi Warga dalam Pembangunan dan Demokrasi*.

Malang:Averroes Press.

_____, 2015. *Perilaku Organisasi* Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat.

Siagian, Sondang P., 1986. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*, Jakarta: PT. Gunung Agung,

_____, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulbert. 1980. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

_____, 2005. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

_____, 2009. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Siti Irene Astuti. D., 2011 *Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project*

Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta:

Sebelas Maret University Press.

STIA. 2013. *Kamus Praktis Administrasi Negara dalam Ruang Lingkup Ilmu Administrasi*. Sumedang; STIA

Suherman, 2014. *Diktat Teori Administrasi Negara*, Sumedang: STIA.

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwarto,fx. 1999. *Perilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya

Syafie, Inu Kencana dan Azhari. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama

Syafiie, Inu Kencana, 2003. *SANRI*, Jakarta: Bumi Aksara.

Syamsi, Ibnu, 1994. *Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Rineka Cipta.

Terry, George R. 1964. *Principles of Management*, Richard D. Irwin (INC.Homewood).

_____, 1990. *Administrasi Kepegawaian Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia

_____, 2002. *Perspektif Perilaku Birokrasi: Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Tika, Moh. Pabundu. 2012. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Trisantono Soemantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokus Media. Bandung.

Usman, Husaini. 2006. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Penelitian*. Jakarta:

Bumi Aksara

Waluyo, 2007. *Manajemen Publik, Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam*

Pelaksanaan Otonomi Daerah, Bandung: Mandar Maju.

Widodo, Teguh. 2015. *Pembangunan Endogen : Mengabaikan Peran Negara*

Dalam Pembangunan. Yogyakarta : Deepublish.

B. DOKUMEN-DOKUMEN

1. Surat Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 27/KEP/1972.
2. Surat Keputusan Bersama Menteri Negara UPW dan Kepala BKKBN No. 11 KEPMEN UPW/IX/84 dan No. 170/HK010/E3/84 Tentang Kerjasama Pelaksanaan Pembangunan Proyek Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Keterpaduan dengan Program Keluarga Berencana.
3. Jurnal BKKBN:2007

C. SUMBER LAINNYA

1. Saca Firmansyah. 2009. Partisipasi Masyarakat.
<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>
2. Andreeyan, Rizal. 2014. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan

Kota Samarinda. <http://ejournal.an.fisip-unmul.org/>. eJournal Administrasi Negara. Vol. 2, No. 4.

3. Putri, Primadini. 2010. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bantuan Kredit Mikro Nagari Melalui Pla Baitul Maal Wat Tamwil. <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/598>. eJournal Kebijakan Publik. Vol.1, No. 2.
 4. Arzaq, Mohammad Yassir dan Tauran. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Desa Dan Kelurahan Siaga Aktif Di Desa Suci Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/11881>. eJournal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 3, No.5.
 5. Paath, Stephanie Regina Setya Ningtyas. 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Elektronik Rukun Tetangga Warga (e-RT/RW) Di Kelurahan Rungkut Menanggal Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya. <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/3273/55>
- 36/. eJournal Administrasi Negara. Vol. 1, No. 3.

STIA
SEBELAS APRIL
SUMEDANG